



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KESEHATAN
KOTA BEKASI
TAHUN 2024**

**DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI
JL PANGERAN JAYAKARTA NO 1
KELURAHAN HARAPAN MULYA**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi.....	5
1.4. Kondisi Sumber Daya Kesehatan	10
1.5. Aspek-Aspek Strategis Organisasi	27
1.6. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi.....	28
1.7. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	31
2.1. Rencana Strategis	31
2.2. Perjanjian Kinerja.....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	36
3.2. Analisis Capaian Kinerja Organisasi.....	39
BAB V PENUTUP	88

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan	6
Tabel 1.1 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kota Bekasi.....	9
Tabel 1.2 Data Ketenagaan Di Dinas Kesehatan, UPTD Instalasi dan UPTD Labkesda Tahun 2024.....	11
Tabel 1.3. Data Ketenagaan Di Puskesmas Dan Rumah Sakit Tahun 2024	13
Tabel 2.1 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi.....	31
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan.....	32
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan.....	34
Tabel 3.1 Evaluasi Kinerja Tahun 2024	37
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2018-2024.....	40
Tabel 3.3. Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) dan Indeks Kesehatan Kota Bekasi dengan Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dan Indonesia	41
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Program Tahun 2024	46
Tabel 3.5 Tabel Anggaran Belanja Pada Dinas Kesehatan Tahun 2024	56
Tabel 3.6 Pemanfaatan Anggaran Kesehatan Tahun 2024.....	58
Tabel 3.7 Tabel Realisasi Anggaran Per Program Pada Dinas Kesehatan Tahun 2024.....	61
Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan Berdasarkan Sumber Pendapatan Pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2024.....	64
Tabel 3.9 Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Kerja Pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2024	64
Tabel 3.10. Analisis Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2024....	67
Tabel 3.11. Analisis Anggaran Berdasarkan Capaian Indikator Sasaran Dan Pemetaan Program/Kegiatan	68
Tabel 3.12. Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2024.....	72

Gambar 3.1 Grafik Prevalensi Stunting Kota Bekasi Tahun 2020-2024	73
Gambar 3.2 Dokumentasi Program Penurunan stunting	77
Tabel 3.13 Data Jumlah KK yang Belum Memiliki Jamban Layak/ Masih BABS Per Kelurahan di Kota Bekasi Tahun 2024 dan Data Kelurahan ODF.	79
Tabel. 3.14. Penghargaan Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2024.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tujuan pembangunan kesehatan dalam UU No. 36 Tahun 2009 adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan dilakukan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan yang komprehensif baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Kesehatan yang maksimal maka diperlukan suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel yang merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu meningkatnya akuntabilitas pengelolaan layanan kesehatan dan terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang sehat

dengan tiga indikator sasaran, yaitu Nilai AKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan dan Usia Harapan Hidup.

Sasaran yang sudah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026 sekaligus ditetapkan sebagai indikator kinerja utama, yaitu Nilai AKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan dan Usia Harapan Hidup. Capaian usia harapan hidup yang tinggi juga dapat meningkatkan capaian indeks pembangunan manusia (IPM) yang menjadi indikator pembangunan daerah.

Untuk mencapai indikator sasaran ada tahun 2024 terdapat 1 program BLPU dengan 8 kegiatan serta 24 Sub Kegiatan dan 4 program BLU dengan 9 kegiatan serta 102 Sub Kegiatan. Namun berdasarkan beberapa hal yang terkait proses pelaksanaan kegiatan diantaranya penambahan anggaran dari dana transfer dan bantuan keuangan yang belum masuk dalam dokumen APBD, penambahan anggaran pokok, anggaran dari SILPA kegiatan tahun sebelumnya, perubahan pendapatan BLUD di RSUD Kelas D dan Puskesmas, efisiensi belanja murni serta kebutuhan anggaran yang belum terakomodir dalam anggaran murni maka dilakukan proses perubahan RKPD sehingga untuk mencapai indikator sasaran telah dilaksanakan 1 program BLPU dengan 8 kegiatan serta 26 Sub Kegiatan dan 4 program BLU dengan 11 kegiatan serta 889 Sub Kegiatan. Berbagai upaya akselerasi peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja utama tahun 2024 antara lain melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat Kota Bekasi, jaminan kesehatan daerah, sinergitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta, pemberdayaan masyarakat, pengembangan layanan RSUD Kelas D, pembangunan Puskesmas baru, pelayanan luar gedung melalui program visit wilayah yang diintegrasikan dengan PIS-PK dan layanan layad rawat serta kebijakan lainnya yang mendukung pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan Kota Bekasi diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahunan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahunan ini dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan masyarakat;

11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
15. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Urusan Pemerintah, Fungsi Penunjang Urusan, Pemerintah dan Urusan Pemerintah Umum yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Bekasi;
16. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 92 Seri D);
17. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tatanan Kerja Pada dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 70 Seri D);
18. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
19. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
20. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
21. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024;
22. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.696-Org/XII/2021 tentang Uraian Tugas Kelompok Substansi Pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi;

23. Berita Acara Rapat TAPD Nomor 900.1.3/74-BA.TAPD/BPKAD tentang Rapat Pembahasan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 5 Februari 2024;
24. Berita Acara Rapat TAPD Nomor 900.1.3/190-BA.TAPD/BPKAD tentang Rapat Pembahasan Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 1 April 2024;
25. Berita Acara Rapat TAPD Nomor 900.1.3/403-BA.TAPD/BPKAD tentang Rapat Pembahasan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 10 Juli 2024;

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.696-Org/XII/2021 tentang Uraian Tugas Kelompok Substansi Pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi

a. Kedudukan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

b. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.696-Org/XII/2021 tentang Uraian Tugas Kelompok Substansi Pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

Gambar 1.1 Strukur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bekasi



Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bekasi terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan.
3. Kelompok Substansi Perencanaan

c. Bidang Kesehatan Masyarakat;

1. Kelompok Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
2. Kelompok Substansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Kelompok Substansi Kesehatan Lingkungan

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

1. Kelompok Substansi Surveilans;
2. Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
3. Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

e. Bidang Pelayanan Kesehatan;

1. Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;
2. Kelompok Substansi Kesehatan Rujukan;
3. Kelompok Substansi Mutu Pelayanan Kesehatan.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;

1. Kelompok Substansi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Kelompok Substansi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
3. Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan

g. UPTD ;

1. Instalasi Farmasi
2. Laboratorium Kesehatan Daerah
3. RSUD Kelas D
4. Puskesmas

c. Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang kesehatan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;

- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas; b. menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
- b. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang kesehatan; d. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang kesehatan
- b. masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- c. menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/ Standard Operating Procedure (SOP) di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- d. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
- e. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas; h. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- f. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
- g. menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah terkait/Kormonev;
- h. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan kepada Perangkat Daerah terkait;

- i. menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- j. menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah;
- k. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah- langkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;
- l. mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- m. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan fungsi urusan kesehatan yang meliputi pelaksanaan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- n. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan sesuai kebijakan Wali Kota;
- o. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka
- p. memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
- q. membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
- u. melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan Perangkat Daerah, secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- v. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

1.4. KONDISI SUMBER DAYA KESEHATAN

Sumber daya kesehatan yang yang terkait dengan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan terdiri dari beberapa hal, antara lain ketersediaan fasilitas Kesehatan dan tenaga Kesehatan. Gambaran Kondisi ketersediaan sumber daya dapat dilihat dari table di bawah ini.

a. Fasilitas Kesehatan

Jumlah sebaran fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kota Bekasi

No	Fasilitas Kesehatan	Pemilikan/Pengelola							Jumlah
		Kemendes	Pem. Prov	Pem. Kab/Kota	Tni/Polri	Bumn	Swasta	Organisasi Kemasyarakatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rumah Sakit									
1	Rumah Sakit Umum			5			35	6	46
2	Rumah Sakit Khusus			0			2		2
Puskesmas Dan Jaringannya									

No	Fasilitas Kesehatan	Pemilikan/Pengelola							Jumlah
		Kemendes	Pem. Prov	Pem. Kab/Kota	Tni/Polri	Bumn	Swasta	Organisasi Masyarakat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Puskesmas Rawat Inap			0					-
	- Jumlah Tempat Tidur								-
2	Puskesmas Non Rawat Inap			48					48
3	Puskesmas Keliling			0					-
4	Puskesmas Pembantu			0					-
Sarana Pelayanan Lain									
1	Klinik Pratama				5		358		363
2	Klinik Utama						71		71
3	Tempat Praktik Mandiri Dokter						48		48
4	Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi						100		100
5	Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis								-
6	Tempat Praktik Mandiri Bidan						307		307
7	Tempat Praktik Mandiri Perawat								-
8	Griya Sehat								-
9	Panti Sehat								-
10	Unit Transfusi Darah			1					1
11	Laboratorium Kesehatan			1			5		6
Sarana Produksi Dan Distribusi Kefarmasian									
1	Industri Farmasi						2		2
2	Industri Obat Tradisional/Ekstrak Bahan Alam (Iot/Ieba)						-		-

No	Fasilitas Kesehatan	Pemilikan/Pengelola							Jumlah
		Kemendes	Pem.Prov	Pem.Kab/Kota	Tni/Polri	Bumn	Swasta	Organisasi Kemasyarakatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Usaha Kecil/Mikro Obat Tradisional (Ukot/Umot)								-
4	Produksi Alat Kesehatan						-		-
5	Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Pkrt)								-
6	Industri Kosmetika						15		15
7	Pedagang Besar Farmasi (Pbf)						66		66
8	Penyalur Alat Kesehatan (Pak)						231		231
9	Apotek					33	717		750
10	Toko Obat						81		81
11	Toko Alkes								-

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Bekasi terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, sarana pelayanan lain dan sarana produksi dan distribusi kefarmasian. Jumlah Rumah Sakit di wilayah Kota Bekasi adalah 48 Rumah Sakit yang terdiri dari 5 Rumah Sakit Pemerintah dan 43 Rumah Sakit Swasta. Untuk jumlah Puskesmas sebanyak 53 Puskesmas yang sudah teregistrasi sebanyak 48 Puskesmas dan 5 Puskesmas baru mendapat ijin operasional. Untuk jumlah sarana kesehatan lainnya di Kota Bekasi sebanyak 896 yang terdiri dari klinik, tempat praktek dokter, bidan perawat, unit transfusi darah dan laboratorium kesehatan. Sedangkan Sarana Produksi Dan Distribusi Kefarmasian sebanyak 1.145 sarana yang terdiri dari industri farmasi, industri kosmetik, pedagang besar farmasi, penyalur alat Kesehatan, apotik dan toko obat.

b. Tenaga Kesehatan

Jumlah ketenagaan yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi tersebar di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Kelas D dan UPTD yang ada di lingkup Dinas Kesehatan. Data Ketenagaan tersebut dapat di lihat pada tabel tabel di bawah ini :

Tabel 1.2 Data Ketenagaan Di Dinas Kesehatan, UPTD Instalasi dan UPTD Labkesda Tahun 2024

NO	JABATAN	JUMLAH	NO	JABATAN	JUMLAH
1	KEPALA DINAS	1	18	Dokter Madya	1
2	Kepala Bidang	4	19	Penata Laporan Keuangan	2
3	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	20	Pengadministrasi Gudang Farmasi	1
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	21	Pengelola Barang Milik Negara	1
5	Kepala UPTD Instalasi Farmasi	1	22	Pengelola Data Sumber Daya Laboratorium Pengujian	1
6	Kepala UPTD Labkesda	1	23	Pengelola Kefarmasian	3
7	Epidemiolog Kesehatan	2	24	Pengelola Layanan Kehumasan	1
8	Nutrisionis	3	25	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	1
9	Administrator Kesehatan	36	26	Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia	3
10	Analisis Dokumen Perizinan	2	27	Penyuluh Kesehatan	2
11	Analisis Kepegawaian	1	28	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2
12	Analisis Kesehatan	1	29	Perencana	1
13	Analisis SDM Aparatur	1	30	Pranata Komputer	4
14	Apoteker	2	31	Pranata Laboratorium Kesehatan	5
15	Arsiparis	3	32	Pranata SDM Aparatur	1
16	Ass. Apoteker	1	33	Sanitarian	5
17	Bendahara	1	34	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku	1
JUMLAH		62	JUMLAH		35
TOTAL : 97 Orang					

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawian Dinkes, 2024

TABEL 1.3. DATA KETENAGAAN DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT TAHUN 2024

No	Unit Kerja	Dr Spesialis	Dokter	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	Keterampilan Fisik	Keteknisian Medis	Tenaga Teknis Kefarmasian	Apoteker	Pejabat Struktural	Tenaga Pendidikan	Tenaga Dukungan Manajemen	Jumlah
	Puskesmas	-	135	82	-	272	468	59	49	51	50	50	2	39	54	51	2	-	630	1.994
1	Puskesmas Pondok Gede	-	3	2	-	6	13	2	1	1	2	2	-	1	1	1	-	-	17	52
2	Puskesmas Jati Makmur	-	2	2	-	5	5	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	9	30
3	Puskesmas Jati Bening	-	2	2	-	5	6	1	1	1	2	2	-	-	1	1	-	-	11	35
4	Puskesmas Jati Bening Baru	-	3	2	-	4	8	1	1	1	1	1	-	2	1	-	-	-	9	34
5	Puskesmas Jati Rahayu	-	3	2	-	5	5	1	1	1	2	2	-	1	1	1	-	-	15	40
6	Puskesmas Jati Warna	-	2	3	-	7	9	1	1	1	1	1	-	3	2	-	-	-	14	45
7	Puskesmas Jati Sampurna	-	4	2	-	10	13	1	2	1	2	2	-	-	1	1	-	-	12	51
	Puskesmas Jati																			28

No	Unit Kerja	Dr Spesialis	Dokter	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	Keterampilan Fisik	Keteknisian Medis	Tenaga Teknis Kefarmasian	Apoteker	Pejabat Struktural	Tenaga Pendidikan	Tenaga Dukungan Manajemen	Jumlah
8	Karya	-	2	1	-	3	9	-	1	1	1	1	-	-	2	1	-	-	6	
9	Puskesmas Jati Ranggan	-	1	2	-	2	6	1	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	7	25
10	Puskesmas Jati Asih	-	4	2	-	6	8	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	19	45
11	Puskesmas Jati Mekar	-	1	1	-	2	6	1	1	-	1	1	-	-	2	-	-	-	12	28
12	Puskesmas Jati Kramat	-	2	1	-	4	7	1	-	-	2	2	-	-	2	1	-	-	6	28
13	Puskesmas Jati Luhur	-	4	2	-	4	9	3	2	1	1	1	-	1	-	2	-	-	14	44
14	Puskesmas Bojong Rawalumbu	-	3	3	-	6	9	1	1	1	2	2	-	1	-	2	-	-	23	54
15	Puskesmas Pengasinan	-	2	2	-	2	12	3	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	17	44
16	Puskesmas Bojong Menteng	-	2	2	-	3	8	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	16	36

No	Unit Kerja	Dr Spesialis	Dokter	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	Keterampilan Fisik	Keteknisian Medis	Tenaga Teknis Kefarmasian	Apoteker	Pejabat Struktural	Tenaga Pendidikan	Tenaga Dukungan Manajemen	Jumlah
17	Puskesmas Karang Kitri	-	4	2	-	9	16	2	1	1	2	2	-	2	2	1	-	-	19	63
18	Puskesmas Bekasi Jaya	-	2	2	-	4	13	1	1	2	1	1	-	1	1	1	-	-	15	45
19	Puskesmas Aren Jaya	-	2	1	-	6	10	1	1	1	2	2	-	2	3	1	-	-	21	53
20	Puskesmas Duren Jaya	-	3	3	-	7	10	3	1	1	2	2	-	1	3	1	-	-	13	50
21	Puskesmas Pekayon Jaya	-	4	3	-	9	15	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	19	58
22	Puskesmas Jaka Mulya	-	2	1	-	9	7	1	1	2	1	1	-	-	1	1	-	-	14	41
23	Puskesmas Jaka Setia	-	6	2	-	4	7	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	14	39
24	Puskesmas Marga Jaya	-	2	1	-	7	10	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	9	36
25	Puskesmas Perumnas Li	-	4	2	-	5	7	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	11	36

No	Unit Kerja	Dr Spesialis	Dokter	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	Keterampilan Fisik	Keteknisian Medis	Tenaga Teknis Kefarmasian	Apoteker	Pejabat Struktural	Tenaga Pendidikan	Tenaga Dukungan Manajemen	Jumlah
26	Puskesmas Seroja	-	3	3	-	5	11	1	1	1	2	2	-	-	1	-	-	-	13	43
27	Puskesmas Perwira	-	2	1	-	7	11	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	12	41
28	Puskesmas Kali Abang Tengah	-	4	1	-	6	13	2	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	14	48
29	Puskesmas Marga Mulya	-	3	1	-	5	10	1	1	1	1	1	-	-	2	2	-	-	12	40
30	Puskesmas Teluk Pucung	-	4	2	-	5	11	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	14	42
31	Puskesmas Harapan Baru	-	2	3	-	7	8	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	12	40
32	Puskesmas Rawa Tembaga	-	3	2	-	5	6	1	1	2	1	1	-	1	-	2	-	-	15	40
33	Puskesmas Bintara Jaya	-	3	1	-	4	9	2	1	2	1	1	-	1	-	2	-	-	8	35
34	Puskesmas Bintara	-	3	2	-	5	7	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	13	37

No	Unit Kerja	Dr Spesialis	Dokter	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	Keterampilan Fisik	Ketektisan Medis	Tenaga Teknis Kefarmasian	Apoteker	Pejabat Struktural	Tenaga Pendidikan	Tenaga Dukungan Manajemen	Jumlah
35	Puskesmas Kranji	-	2	2	-	10	12	1	1	2	1	1	-	2	-	2	-	-	13	49
36	Puskesmas Kotabaru	-	4	2	-	6	9	3	2	2	-	-	-	-	2	1	-	-	10	41
37	Puskesmas Pejuang	-	3	3	-	6	12	1	1	1	1	1	-	1	2	2	-	-	22	56
38	Puskesmas Harapan Mulya	-	2	1	-	5	10	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	15	37
39	Puskesmas Medan Satria	-	2	2	-	2	12	3	1	1	1	1	-	1	1	2	-	-	15	44
40	Puskesmas Kalibaru	-	2	-	-	4	9	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	10	32
41	Puskesmas Bantargebang	-	4	1	-	9	10	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	21	54
42	Puskesmas Cikiwul	-	1	1	-	2	12	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	11	32
43	Puskesmas Ciketing Udik	-	1	1	-	5	9	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	10	33

No	Unit Kerja	Dr Spesialis	Dokter	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	Keterampilan Fisik	Keteknisian Medis	Tenaga Teknis Kefarmasian	Apoteker	Pejabat Struktural	Tenaga Pendidikan	Tenaga Dukungan Manajemen	Jumlah
44	Puskesmas Sumur Batu	-	2	1	-	6	11	1	2	1	1	1	-	1	2	1	-	-	9	39
45	Puskesmas Mustika Jaya	-	6	1	-	9	13	2	1	2	-	-	-	2	3	1	-	-	15	55
46	Puskesmas Mustika Sari	-	4	1	-	7	13	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	32
47	Puskesmas Cimuning	-	3	1	-	10	12	1	1	2	-	-	-	1	1	2	-	-	10	44
48	Puskesmas Padurenan	-	3	1	-	8	10	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	10	40
																				-
	Rumah Sakit	1.027	729	128	72	5.005	809	44	35	148	501	791	232	227	530	282	155	1	5.646	16.362
1	Rsud Pondok Gede	11	12	4	-	51	29	4	1	2	12	14	1	5	5	3	5	-	109	268
2	Rs Masmitra	21	22	3	2	109	23	1	1	2	21	21	5	10	9	9	-	-	134	393

No	Unit Kerja	Dr Spesialis	Dokter	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	Keterampilan Fisik	Ketektisan Medis	Tenaga Teknis Kefarmasian	Apoteker	Pejabat Struktural	Tenaga Pendidikan	Tenaga Dukungan Manajemen	Jumlah
3	Rs Karunia Kasih	21	7	2	4	59	20	-	-	1	6	11	2	3	12	3	-	-	28	179
4	Rs Helsa Jati Rahayu	9	8	-	-	50	12	-	2	1	6	26	3	-	5	4	5	-	66	197
5	Rsud Jati Sampurna	8	12	5	-	71	25	3	1	2	10	11	2	4	6	2	4	-	94	260
6	Rs Jati Sampurna	21	19	5	1	82	13	-	1	2	11	11	1	4	6	3	-	-	94	274
7	Rs Permata Cibubur	29	29	2	4	126	31	-	1	4	21	27	7	6	41	9	-	1	224	562
8	Rs Mitra Keluarga Cibubur	20	12	3	5	128	9	-	1	7	19	19	8	7	38	10	8	-	153	447
9	Rs Kartika Husada	27	17	1	-	55	15	-	-	-	1	5	1	2	-	4	-	-	31	159
10	Rs Mitra Keluarga Pratama	24	18	5	3	127	8	-	-	6	14	14	6	4	11	8	6	-	93	347

No	Unit Kerja	Dr Spesialis	Dokter	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	Ket erampilan Fisik	Ket eknisian Medis	Tenaga Teknis Kefarmasian	Apoteker	Pejabat Struktural	Tenaga Pendidikan	Tenaga Dukungan Manajemen	Jumlah
11	Rs Rawa Lumbu	24	10	2	-	69	11	1	1	3	3	5	2	9	4	3	-	-	46	193
12	Rs St. Elisabeth	28	17	4	2	85	8	-	1	5	7	8	5	-	12	5	11	-	188	386
13	Rs Siloam Bekasi Sepanjang Jaya	20	21	2	1	102	11	-	1	1	8	8	3	-	9	5	3	-	110	305
14	Rs Mitra Keluarga Bekasi Timur	27	19	4	7	248	15	-	1	9	17	17	7	7	39	12	2	-	261	692
15	Rs Primaya Bekasi Timur	56	22	5	3	148	9	-	-	4	23	53	7	2	16	5	-	-	168	521
16	Rs Bhakti Kartini	15	16	3	1	89	20	-	2	2	7	7	6	8	8	10	-	-	121	315
17	Rs Mekar Sari	23	19	2	-	100	20	-	1	4	10	15	7	9	10	7	-	-	102	329
18	Rs Bella	20	16	3	-	82	9	-	1	1	14	14	7	8	24	4	12	-	78	293

No	Unit Kerja	Dr Spesialis	Dokter	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	Ket erampilan Fisik	Ket eknisian Medis	Tenaga Teknis Kefarmasian	Apoteker	Pejabat Struktural	Tenaga Pendidikan	Tenaga Dukungan Manajemen	Jumlah
19	Rs Graha Juanda	15	16	3	1	44	15	-	-	4	5	15	2	2	3	4	-	-	65	194
20	Rs Islam Dr. Subki Abdulkadir	10	10	1	-	15	5	-	1	1	2	5	5	1	1	2	-	-	27	86
21	Rs Siloam Sentosa	21	14	3	-	67	5	-	-	1	8	18	2	1	2	4	-	-	90	236
22	Rs Juwita	9	3	-	1	12	11	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	42	83
23	Rs Siloam Bekasi Timur	21	20	2	3	75	10	-	1	2	18	32	5	5	10	7	10	-	116	337
24	Rsud Dr. Chasbullah Abdulmadjid	42	39	3	5	610	93	7	5	21	30	63	15	37	40	24	22	-	684	1.740
25	Rs Mitra Keluarga Bekasi Barat	91	29	5	7	365	19	1	2	10	39	52	6	8	54	25	3	-	240	956
	Rs Hermina																			1.300

No	Unit Kerja	Dr Spesialis	Dokter	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	Ket erampilan Fisik	Ket eknisian Medis	Tenaga Teknis Kefarmasian	Apoteker	Pejabat Struktural	Tenaga Pendidikan	Tenaga Dukungan Manajemen	Jumlah
26	Bekasi	68	46	1	-	431	28	3	1	3	54	94	39	24	30	10	7	-	461	
27	Rs Primaya Bekasi Barat	67	30	2	9	304	15	-	-	24	26	52	11	22	29	12	-	-	242	845
28	Rs Anna	28	15	11	3	115	28	-	-	2	13	13	3	9	23	5	17	-	147	432
29	Rs Hermina Galaxy	24	22	4	4	123	21	1	1	1	12	17	8	-	22	7	3	-	195	465
30	Rs Emc Pekayon	25	19	1	-	148	4	-	-	2	16	16	6	6	7	11	-	-	55	316
31	Rs Dokter Adam Talib Cikunir	1	3	1	-	11	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	10	30
32	Rs Anna Medika	10	18	-	-	106	11	-	-	-	7	7	2	-	1	7	-	-	101	270
33	Rs Taman Harapan Baru	22	11	5	2	54	25	-	1	1	9	15	1	-	1	5	-	-	100	252
34	Rs Primaya Bekasi Utara	26	19	4	1	118	14	-	1	-	8	49	8	-	5	4	1	-	118	376

No	Unit Kerja	Dr Spesialis	Dokter	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	Ket erapi an Fisik	Ket eknisia n Medis	Tenaga Teknis Kefarmasian	Apoteker	Pejabat Struktural	Tenaga Pendidikan	Tenaga Dukungan Manajemen	Jumlah
35	Rs Seto Hasbadi	11	8	-	-	35	10	-	-	2	2	2	2	2	2	5	3	-	47	131
36	Rsia Rinova Intan	1	6	2	-	4	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	8	35
37	Rsud Teluk Pucung	10	10	2	1	29	22	1	1	3	3	3	1	-	2	1	4	-	89	182
38	Rsia Selasih Medika	15	10	3	-	30	25	-	2	2	6	6	-	5	2	2	-	-	77	185
39	Rs Ananda	28	20	6	-	195	35	17	-	4	1	8	4	1	9	7	1	-	127	463
40	Rs Citra Harapan	16	8	4	2	43	8	-	-	1	6	6	1	4	-	8	3	-	49	159
41	Rs Emhaka	-	4	-	-	8	15	-	-	-	1	1	-	-	-	2	13	-	49	93
42	Rs Pertamedika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Rsud Bantargebang	11	10	5	-	51	36	2	-	4	9	9	2	1	3	3	5	-	103	254

No	Unit Kerja	Dr Spesialis	Dokter	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	Ket erampilan Fisik	Ket eknisian Medis	Tenaga Teknis Kefarmasian	Apoteker	Pejabat Struktural	Tenaga Pendidikan	Tenaga Dukungan Manajemen	Jumlah
44	Rs Karya Medika Bantargebang	10	9	-	-	35	9	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	51	119
45	Rs Citra Arafiq	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Rs Permata Bekasi	19	26	3	-	127	24	-	1	3	10	10	22	7	16	9	-	-	167	444
47	Rs Satria Medika	17	7	2	-	58	15	2	-	1	6	12	3	3	8	5	7	-	63	209
48	Rs Mustika Medika Bekasi	5	1	-	-	11	5	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	23	50
																				-
	Sarana Pelayanan Kesehatan Lain	19	442	208	9	256	217	5	2	7	29	30	15	36	186	284	59	4	1.181	2.989
1	Klinik	15	433	208	5	223	214	4	1	7	9	9	15	18	75	84	40	4	785	2.149
	Psc 119																			4

No	Unit Kerja	Dr Spesialis	Dokter	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	Keterampilan Fisik	Keteknisian Medis	Tenaga Teknis Kefarmasian	Apoteker	Pejabat Struktural	Tenaga Pendidikan	Tenaga Dukungan Manajemen	Jumlah
2		-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Laboratorium Kesehatan	4	3	-	4	8	1	-	1	-	20	21	-	-	-	-	6	-	83	151
4	Upt Transfusi Darah	-	2	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	25	66
5	Sarana Kefarmasian Dan Alat Kesehatan	-	4	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	111	200	13	-	286	619
Jumlah (Kota Bekasi)		1.046	1.307	418	81	5.537	1.501	122	90	210	581	872	249	302	261	368	267	9	7.898	21.119

Sumber Data : Profil Kesehatan 2023

1.5 ASPEK-ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis organisasi dapat diidentifikasi dan dikelompokkan menjadi tantangan dan peluang dalam pembangunan kesehatan yaitu:

Tantangan

1. Saat ini masih menghadapi triple burden/beban tiga kali lipat berbagai masalah penyakit yaitu yang pertama adanya Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-Emerging , kedua Penyakit Menular belum teratasi dengan baik dan yang ketiga Penyakit Tidak Menular (PTM) cenderung naik;
2. Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular klasik, yaitu Tuberkulosis (TB), Kusta, Diare, DBD, Filarisiasi, Malaria, Leptospirosis, dll;
3. Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit Tidak Menular (Non-Communicable Disease), yaitu Hipertensi, Diabetes Mellitus, Penyakit Kardiovaskuler (CVD), Ischemic Heart Disease, PPOK, Kanker, dll.
4. Penurunan angka stunting masih jadi perhatian terkait permasalahan gizi di masyarakat

Peluang

1. Ketersediaan fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang dapat berperan dalam pembangunan kesehatan;
2. Era Globalisasi sekarang ini kemajuan teknologi sangat berkembang dengan begitu pesat. Salah satu kemajuan teknologi informasi merambah pada bidang kesehatan. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi ini merupakan salah satu solusi tepat bagi pemecahan masalah layanan publik;
3. penguatan aspek ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal peningkatan gizi dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan tantangan dan peluang yang ada dan berdasarkan isu-isu penting Rensta maka dapat diketahui isu-isu penting dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Isu-isu tersebut antara lain :

1. Peningkatan utilisasi Puskesmas dalam Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan dalam rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (SPM);
2. Implementasi Pelayanan RSUD kelas D secara maksimal ke masyarakat;

3. Pengembangan 2 Rumah Sakit Kelas D yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Pondok Gede dan Rumah Sakit Umum Daerah Jatisampurna menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C;
4. Peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan melibatkan lintas sektor dan masyarakat serta Surveilans aktif dalam rangka penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
5. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
6. Peningkatan mutu layanan FKTP dan FKTR melalui registrasi, akreditasi dan pemenuhan sumber daya kesehatan;
7. Konvergensi dan intervensi penanganan stunting;
8. Penguatan layanan rujukan melalui pemanfaatan aplikasi layanan Kesehatan rujukan dan PSC 119

1.6 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang urusan, Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Bekasi, maka program dan kegiatan Dinas Kesehatan diarahkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, yang dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Pengelolaan upaya kesehatan perorangan dan rujukan tingkat kota.

Produk layanan yang diberikan antara lain pengelolaan upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan rawat jalan/rawat inap di Puskesmas dan rumah sakit.

- b. Upaya kesehatan masyarakat dan rujukan tingkat kota.

Produk layanan yang diberikan antara lain pengelolaan upaya kesehatan masyarakat yang meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, penyehatan lingkungan dan peningkatan kesehatan keluarga.

- b. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota.

Produk layanan yang diberikan antara lain menerbitkan rekomendasi sebagai salah satu syarat perizinan fasilitas kesehatan.

- c. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.

Produk layanan yang diberikan antara lain menerbitkan rekomendasi sebagai salah satu syarat perizinan praktek dan izin kerja tenaga kesehatan

- d. Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dalam Daerah Kota.

Produk layanan yang diberikan antara lain perencanaan SDM Kesehatan, penyusunan analisa jabatan dan beban kerja tenaga kesehatan serta perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendidikan.

- e. Penerbitan izin sarana kefarmasian dan produk makanan dan minuman

Produk layanan yang diberikan antara lain menerbitkan rekomendasi sebagai salah satu syarat perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal, usaha mikro obat tradisional, sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu), izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, serta pengawasan post market produk makanan minuman industri rumah tangga.

- f. Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan melalui tokoh Kota, kelompok Masyarakat, organisasi swadaya Masyarakat dan dunia usaha tingkat Kota.

Produk layanan yang diberikan antara lain mempromosikan hidup bersih dan sehat kepada kelpmpok masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Posyandu dan Posbindu.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; dasar hukum, tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut: 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;

3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis; 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kota Bekasi tahun 2024-2026 merupakan rencana strategis disusun seiring dengan penyusunan RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026 dan telah di lakukan revisi kedua pada Renstra Dinas Kesehatan. Adapun tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra tersebut adalah sebagai berikut:

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Bekasi

a. Tujuan Dinas Kesehatan Kota Bekasi

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu isu dan analisis lingkungan strategis , sehingga dapat mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kesehatan Kota Bekasi akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Berdasarkan telaah dan analisis dari berbagai faktor, maka Tujuan Dinas Kesehatan Kota Bekasi adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Yang Profesional dan Akuntabel” dan “ Meningkatkan Akses Dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat”.

b. Sasaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu

dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga dapat digunakan sebagai alat pemicu bagi Perangkat Daerah terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Sasaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi adalah “Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja” dan “Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi Yang Sehat”.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas kesehatan Kota Bekasi beserta indikator kerjanya dapat dilihat pada tabel 2.1.1 dibawah ini:

Tabel 2.1 1Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				1 (2024)	2 (2025)	3 (2026)
1.	Mewujudkan		Nilai AKIP	79	80	81
	Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Yang Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	79	80	81
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	80
2.	Meningkatkan Akses Dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup	75,47	75,59	75,70
		Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi yang Sehat	Usia Harapan Hidup	75,47	75,59	75,70

Sumber : Renstra Dinkes, 2024-2026

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Tabel dibawah ini menunjukkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Bekasi selama periode Renstra 5 tahun, disertai pula alasan, rumus dan target selama 5 tahun.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumusan		Target		
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai AKIP merupakan hasil penilaian akuntabilitas kinerja atau pertanggung jawaban kinerja Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra dan menjadi dasar untuk peningkatan kinerja yang akan datang	Nilai komponen perencanaan kinerja + Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai komponen pelaporan kinerja + Nilai komponen evaluasi kinerja + Nilai komponen capaian kinerja	79	80	81
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Indeks kepuasan masyarakat merupakan hasil pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang dapat menjadi acuan dalam melakukan perbaikan layanan kepada masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	80	80	80

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumusan		Target		
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026
2.	Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi yang Sehat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan komponen yang menentukan capaian Indeks Kesehatan sebagai Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bekasi	Jumlah semua umur dari seluruh kematian pada waktu tertentu Jumlah orang yang meninggal pada waktu tertentu (perhitungan dilakukan oleh BPS)	75,47	75,59	75,70

Sumber : Renstra Dinkes, 2024-2026

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja sebagaimana tertuang dalam Dokumen Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	79
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80
2.	Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi yang Sehat	Usia Harapan Hidup	75,47

	Jumlah Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 255.424.594.746,- Anggaran Perubahan APBD
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 541.017.638.122,- Anggaran Perubahan APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 50.778.093.600,- Anggaran Perubahan APBD
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 187.400.000,- Anggaran Perubahan APBD
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 15.175.470.989,- Anggaran Perubahan APBD
	TOTAL	Rp. 862.583.197.457,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Kesehatan Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat Kota Bekasi melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Bekasi yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2023

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Kinerja Pemerintah Kota Bekasi diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi Indikator sasaran. Media pengukuran kinerja adalah Lampiran Pengukuran Kinerja (PK).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai maknadari nilai tersebut yaitu :

- $\geq 100\%$ = Target Tercapai

- $< 100\%$ = Target Tidak Tercapai

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*).

2. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pengumpulan data kinerja Dinas Kesehatan dilakukan melalui rekapitulasi dan analisis data pendukung yang berasal dari UPTD, Kelompok Substansi dan Bidang serta Subbag dan Sekretariat.

Sasaran yang ditetapkan TAPKIN 2024 ada 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator sasaran, yang terinci sebagai berikut :

Tabel 3.1 Evaluasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi / Cara Pengukuran	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2023	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai komponen perencanaan kinerja + Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai komponen pelaporan kinerja + Nilai komponen evaluasi kinerja + Nilai komponen capaian kinerja = 23,48+23,49+13.38+20,32 = 80,67	79	80,67	102,11	LHE SAKIP Dinas Kesehatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	(Total dari Nilai Rata-Rata (NRR) x Bobot nilai rata rata tertimbang x Nilai Dasar (25) = (NRR U1+U2+U3+U4+U5+U6+U7+U8+U9) x 1/9 x 25 = (3.277+3.327+3.248+3.149+3.337+3.307+3.584+3.198+3.753) x 0.1111 x 25 = 83.83	80	83,83	104,79	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
2.	Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi yang Sehat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Jumlah semua umur dari seluruh kematian pada waktu tertentu Jumlah orang yang meninggal pada waktu tertentu (perhitungan dilakukan oleh BPS)	75,47	76,14	100,89	BPS

Sumber : Laporan Capaian IKU Dinkes, 2024

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Capaian IKU Dinas Kesehatan

Pencapaian 3 (tiga) indikator sasaran secara umum sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu :

1. Persentase capaian kinerja pada indikator nilai AKIP Perangkat Daerah tahun 2024 adalah 102,11 % (target 79 dan realisasi 80,67). Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dimana persentase capaian kinerja pada nilai AKIP tahun 2023 adalah 104,80% (target 77 realisasi 80,70).

Capaian ini di dukung oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Komitmen pegawai Dinas Kesehatan dan UPTD lingkup Dinas kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan tetap berpedoman pada pelayanan prima
- b. Konsistensi pelayanan kesehatan dengan penerapan SOP layanan
- c. Monev berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan dalam melakukan evaluasi kinerja yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2024

2. Persentase capaian kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah 104,79% (target 80 dan realisasi 83,83). Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan dimana persentase capaian kinerja tahun 2023 adalah 108,23% (target 80 realisasi 86,55).

Capaian ini di dukung oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Peningkatan kualitas layanan dan peningkatan kompetensi pegawai dengan adanya pelatihan pelatihan yang dilakukan di tahun 2024
- b. Sarana prasarana yang cukup memadai
- c. Status Puskesmas sebagian besar sudah terakreditasi sehingga mutu layanan sudah semakin baik
- d. Ketersediaan media pengaduan disetiap unit layanan. Unit layanan sudah menyusun standar pelayanan yang menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan

3. Persentase capaian kinerja pada indikator usia harapan hidup tahun 2024 adalah 100,89 % (target 75,47 dan realisasi 76,14). Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan dimana persentase capaian kinerja tahun 2023 adalah 100,19% (target 75,33 realisasi 75,48).

Pencapaian ini didukung oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Penyediaan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat di Kota Bekasi;
- b. Penyediaan sumber daya kesehatan melalui pemenuhan anggaran kesehatan dengan sumber dana APBD, DAK, Bantuan DKI, Bantuan Provinsi Jawa Barat dan JKN;
- c. Penerapan SIRINE (Sistem Informasi Rujukan Online) melalui PSC 119 untuk mempermudah warga Kota Bekasi untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- d. Penerapan Aplikasi SIJONI (Sistem Jaminan Online) untuk mempermudah masyarakat memperoleh jaminan Kesehatan dengan harapan Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Bekasi dapat mencapai Target UHC (Universal Health Coverage) 100%. Saat ini capai UHC Kota Bekasi sebesar 99,58%;
- e. Penyediaan Layanan PDP (Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan) Bagi Penderita HIV yang sudah tersebar Pada 11 Rumah Sakit dan 14 Puskesmas;
- f. Dukungan lintas sektor melalui sinergitas dalam pembangunan kesehatan terutama di lingkungan kelurahan, kecamatan dan Pemerintah Kota Bekasi;
- g. Adanya dukungan fasilitasi Kesehatan swasta seperti klinik, rumah bersalin dan RS yang telah turut serta memberikan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Bekasi;
- h. Adanya penambahan Puskesmas yang telah membagi beban kerja di masing masing wilayah sehingga Puskesmas lebih focus dalam melayani masyarakat di 1-2 Kelurahan saja, jumlah Puskesmas sampai tahun 2024 adalah 53 Puskesmas.

Apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2023 maka telah ada peningkatan kinerja pada tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2018-2024

Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun*							Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun							% Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun						
	Exisiting 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Exisiting 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Exisiting 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai AKIP Perangkat Daerah	72,18	66,28	70,05	73,25	75	77	79	75,18	80,61	80,64	80,65	80,65	80,7	80,67	100	121,62	115,18	110,1	107,53	104,8	102,11
Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61	76,61	76,61	80	80	80	80	76,61	88,15	79,85	82,58	84,18	86,55	83,83	100	115,06	104,23	103,23	105,23	108,19	104,79
Usia Harapan Hidup (UHH)	74,76	74,89	75,01	75,12	75,23	75,33	75,47	74,76	74,89	75,01	75,19	75,48	75,79	76,14	100,00	100,00	100,00	100,09	100,33	100,61	100,89

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2018-2024 dapat di ketahui bahwa ketiga IKU (Indikator Kunci Utama) Dinas Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan dan Usia Harapan Hidup (UHH) mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk Nilai AKIP ada penurunan di tahun 2024.

Capaian Usia Harapan Hidup di Kota Bekasi merupakan indikator utama untuk menghitung indeks Kesehatan. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh BPS dapat di Ketahui Nilai Indeks Kesehatan di Kota Bekasi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat dan di Indonesia, Adapun perbandiang tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3. Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) dan Indeks Kesehatan Kota Bekasi dengan Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dan Indonesia

No	Kabupaten/ Kota	UHH	Indeks Kesehatan
1	Kota Bekasi	76,14	86,37
2	Kota Bandung	75,83	85,89
3	Kota Depok	75,82	85,88
4	Kota Bogor	75,8	85,85
5	Kota Cimahi	75,55	85,46
6	Kota Cirebon	75,48	85,35
7	Bekasi	75,33	85,12
8	Kota Tasikmalaya	75,31	85,09
9	Sumedang	75,29	85,06
10	Ciamis	75,26	85,02
11	Bandung	75,23	84,97
12	Kuningan	75,22	84,95
13	Karawang	75,16	84,86
14	Pangandaran	75,11	84,78
15	Kota Sukabumi	75,11	84,78
16	Subang	75,08	84,74
17	Bandung Barat	75,06	84,71
18	Kota Banjar	74,99	84,60
19	Cirebon	74,98	84,58
20	Majalengka	74,98	84,58
21	Purwakarta	74,92	84,49
22	Bogor	74,9	84,46
23	Garut	74,87	84,42
24	Sukabumi	74,85	84,38

No	Kabupaten/ Kota	UHH	Indeks Kesehatan
25	Indramayu	74,82	84,34
26	Cianjur	74,8	84,31
27	Tasikmalaya	74,06	83,17
Jawa Barat		75,16	84,86
Indonesia		72,39	80,6

B. Capaian Indikator Program

Tercapainya indikator program Dinas Kesehatan Tahun 2024 seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Program Tahun 2024

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact /Outcome	Satu an	Kondisi Awal20 23	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 20224	Prosentase Capaian Terhadap Target 2023
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Optimalisasi Disiplin Aparatur	%	100	100,00	100,00	100%
	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100,00	100,00	100%
	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100,00	100,00	100%
	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100,00	100,00	100%
	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100,00	100,00	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact /Outcome)	Satu an	Kondisi Awal20 23	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 20224	Prosentase Capaian Terhadap Target 2023
	Cakupan rumah tangga Ber- PHBS	%	65,15	64,00	65,03	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
	Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)	%	33,33	16,00	31,25	
	Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi	%	100	100,00	100,00	100,00%
	persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas	%	68,5	68,00	72,17	106,13%
	persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type D	%	75,58	60,00	77,40	129,00 %
	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	95,83	83,00	90,57	109,12%
	persentase Rumah sakit Terakreditasi	%	97,92	100,00	100,00	100,00%
	persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan Rumah Sakit	%	100	100,00	100,00	100,00%

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact /Outcome)	Satu an	Kondisi Awal20 23	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 20224	Prosentase Capaian Terhadap Target 2023
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	%	100	100,00	100,00	100,00%
	Persentase cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan	%	100	100,00	100,00	100,00%
	Prevalensi Balita Status Gizi Stunting	%	2,99	7,82	2,89	270,59%
	persentase Institusi dan fasilitas umum memenuhi syarat kesehatan	%	75,68	72,00	92,86	128,97%
	Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan	Puskesmas	53	50,00	53,00	106,00%
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	96,83	100,00	100,00	100,00%
	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97,28	100,00	100,00	100,00%
	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97,17	100,00	98,61	98,61%
	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	95,7	100,00	85,44	85,44%
	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	88,3	100,00	89,72	89,72%

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact /Outcome)	Satu an	Kondisi Awal20 23	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 20224	Prosentase Capaian Terhadap Target 2023
	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	27,97	100,00	54,50	54,50%
	Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	91,3	100,00	95,36	95,36%
	Persentase Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	70,15	100,00	69,77	69,77%
	Persentase Warga Negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	99,97	100,00	100,00	100,00%
	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	%	84,21	100,00	97,32	97,32%
	Persentase Warga Negara penderita terduga Tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,9	100,00	100,00	100,00%

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact /Outcome)	Satu an	Kondisi Awal20 23	Target Tahun 2024	Realisasi Target Tahun 20224	Prosentase Capaian Terhadap Target 2023
	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficien cy Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	101,86	100,00	100,00	100,00%
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman						
	persentase jumlah sarana kefarmasian yang memenuhi standar kesehatan	%	100	100,00	96,80	96,80%
	persentase jumlah produk pangan industri rumah tangga(PIRT) berlabel yang memenuhi standar kesehatan	%	100	100,00	100,00	100,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan						
	persentase ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas dan RS	%	89,54	100,00	77,00	77,00%

Sumber : Laporan Capaian Program Dinkes, 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 34 indikator Program yang mencapai target sebanyak 25 indikator dan 9 indikator ada yang belum mencapai target.

Adapun penjelasan dari indikator Program Urusan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Cakupan rumah tangga Ber-PHBS

Jumlah KK yang ada yang PHBS 15.413 dibagi jumlah kk yang dipantau 23,700

2. Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)

Mencapai Target (jumlah Puskesmas Mampu Poned 15 Puskesmas dari 48 Puskesmas yang terregistrasi)

3. Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi

Mencapai Target (4 RSUD Type D sudah memiliki gedung yang berfungsi baik)

4. Persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas

Berdasarkan data Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) sudah mencapai target dapat diketahui sampai dengan desember tahun 2024 capainnya adalah sebesar 72,17% dari target 68,00%.

5. Persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type D

Berdasarkan data Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) sudah mencapai target dapat diketahui sampai dengan desember tahun 2024 capainnya adalah sebesar 77,40% dari target 60,00%.

6. Persentase Puskesmas Terakreditasi

Mencapai Target (48 Puskesmas terakreditasi dari 53 Puskesmas yang ada)

7. Persentase Rumah sakit Terakreditasi

Mencapai Target (48 Rumah Sakit sudah terakreditasi)

8. Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan Rumah Sakit

Ketersediaan Obat dan BMHP di seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas sudah terpenuhi 100%

9. Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas

Terlayani :340873 Sasaran :340873

10. Persentase cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan

Terlayani :899 Sasaran :899

11. Prevalensi Balita Status Gizi Stunting

Mencapai target, capaian stunting semakin rendah semakin tercapai dari target yang ditetapkan alita Stunting:3641 Balita yang diukur:125989

12. persentase Institusi dan fasilitas umum memenuhi syarat kesehatan

yang memenuhi syarat:1118 seluruh institusi:1204

13. Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan

Jumlah Puskemas di wilayah Kota Bekasi yang sudah melakukan pelayanan sebanyak 53 Puskesmas (dari target RPD 50 Puskesmas)

14. Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan

Persentase SPM pada ibu hamil didapatkan dari jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan sesuai standar dibagi dengan jumlah ibu bersalin yang ada, maka sebagai sasaran pada SPM ibu hamil digunakan jumlah ibu bersalin. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024. Pada tahun 2024 terdapat 41.732 sasaran ibu hamil di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan bulanan pelayanan di Puskesmas jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai adalah 40.679 orang (97,50%). Diperoleh dari kunjungan bumil ke-6 di fasilitas kesehatan. Kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya: Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Bayi Oleh Tim AMPSR Kota Bekasi sebanyak 4 kali dalam 1 tahun, Pelatihan Pelayanan ANC dan USG Obstetri Dasar Terbatas Pada Dokter Umum, Pengadaan Buku KIA Versi 2023, Pendampingan Tim Ahli dalam Pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan Maternal Neonatal di FKTP, Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil, Antenatal Care (ANC) dan Stunting, Diseminasi kasus Kematian Ibu dan Anak, Supervisi Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Puskesmas, Validasi Data, Distribusi Buku KIA Versi 2024 ke Puskesmas (Hibah Kemenkes RI). Belum kuatnya kemitraan jejaring antara fasilitas kesehatan (RS, TPMB, Klinik) dengan Puskesmas wilayah menjadi permasalahan. Sehingga masih perlu meningkatkan kemitraan antara fasilitas kesehatan lintas wilayah untuk pelaporan pelayanan yang lebih optimal, misalnya dengan penyusunan MOU antara Dinas Kesehatan dg RS se-Kota Bekasi, penyusunan MOU antara Puskesmas wilayah dg jejaringnya (Klinik, TPMB).

15. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan

Tahun 2024 terdapat 41.732 sasaran ibu bersalin di Kota Bekasi. Berdasarkan

laporan bulanan pelayanan di Puskesmas jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai adalah 40.449 orang (96.95%). Diperoleh dari jumlah kunjungan ibu bersalin di fasilitas Kesehatan. Pada umumnya kendala yang dihadapi sama dengan kendala pada pelayanan Kesehatan pada ibu hamil yaitu Belum kuatnya kemitraan jejaring antara fasilitas kesehatan (RS, TPMB, Klinik) dengan Puskesmas wilayah menjadi permasalahan. Sehingga masih perlu meningkatkan kemitraan antara fasilitas kesehatan lintas wilayah untuk pelaporan pelayanan yang lebih optimal, misalnya dengan penyusunan MOU antara Dinas Kesehatan dg RS se-Kota Bekasi, penyusunan MOU antara Puskesmas wilayah dg jejaringnya (Klinik, TPMB). Kegiatan yang sudah dilakukan untuk meningkatkan capaian SPM Pelayanan Kesehatan ibu bersalin adalah Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Bayi Oleh Tim AMPSR Kota Bekasi sebanyak 4 kali dalam 1 tahun, Pelatihan Pelayanan ANC dan USG Obstetri Dasar Terbatas Bagi Dokter Umum Puskesmas, Pengadaan Buku KIA Versi 2023, Pendampingan Tim Ahli dalam Pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan Maternal Neonatal di FKTP, Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil, Antenatal Care (ANC) dan Stunting, Diseminasi kasus Kematian Ibu dan Anak Supervisi Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di Puskesmas, alidasi Data, Distribusi Buku KIA Versi 2024 ke Puskesmas (Hibah Kemenkes RI).

16. Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan

Tahun 2024 terdapat 40.438 sasaran bayi baru lahir di Kota Bekasi berdasarkan jumlah kelahiran hidup. Berdasarkan laporan bulanan pelayanan di Puskesmas jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 39.876 orang (98.61%). Diperoleh dari jumlah kunjungan ke-3 (KN3) bayi baru lahir di fasilitas kesehatan ditambah dengan layanan pada kegiatan posyandu di masyarakat. Meskipun capaian sudah mendekati target 100%, belum kuatnya kemitraan jejaring antara fasilitas kesehatan (RS, TPMB, Klinik) dengan Puskesmas wilayah masih menjadi permasalahan. Sehingga masih perlu meningkatkan kemitraan antara fasilitas kesehatan lintas wilayah untuk pelaporan pelayanan yang lebih optimal, misalnya dengan penyusunan MOU antara Dinas Kesehatan dg RS se-Kota Bekasi, penyusunan MOU antara Puskesmas wilayah dg jejaringnya (Klinik, TPMB). Kegiatan yang sudah dilakukan dalam Pelayanan Kesehatan Bayi

Baru Lahir adalah Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Bayi Oleh Tim AMPSR Kota Bekasi sebanyak 4 kali dalam 1 tahun, Pengadaan Buku KIA Versi 2023, Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK), Skrining Glukosa-6- Fosfat Dehidrogenase (G6PD), Skrining Hiperplasia Kongenital (S-HAK) dan Skrining Penyakit Jantung Bawaan pada bayi baru lahir, Pendampingan Tim Ahli dalam Pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan Maternal Neonatal di FKTP, Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil, Antenatal Care (ANC) dan Stunting, Diseminasi kasus Kematian Ibu dan Anak, Supervisi Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Puskesmas, Validasi Data, Distribusi Buku KIA Versi 2024 ke Puskesmas (Hibah Kemenkes RI).

17. Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan

Tahun 2024 terdapat 150.066 sasaran balita di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan bulanan pelayanan di Puskesmas jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 144.969 orang (96,60%). Capaian meningkat dari tahun lalu. Kegiatan yang sudah dilakukan untuk meningkatkan capaian SPM Pelayanan Kesehatan balita adalah Supervisi Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita di Puskesmas, Validasi Data, Pelatihan MTBS dan Gizi buruk. Pelatihan SDIDTK dan PMBA. Kendala yang dihadapi diantaranya Masyarakat kurang memahami tentang pentingnya pemantauan perkembangan bagi kualitas generasi penerus bangsa, Kurang kuatnya kemitraan antara Dinas Kesehatan dan DPP KB (Bina Keluarga Balita).

18. Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan

Tahun 2024 terdapat 383.845 anak usia pendidikan dasar yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 347.764 orang (90,60%). Meskipun ada peningkatan capaian dari tahun lalu, masih ditemukan kendala diantaranya belum efektifnya koordinasi dengan lintas sektor terkait sasaran usia pendidikan dasar yang tidak bersekolah. Kegiatan yang sudah dilakukan yaitu Supervisi Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar di Puskesmas, Validasi Data, Pengadaan Buku Raport Kesehatanku.

19. Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan

Tahun 2024 terdapat 1.688.228 warga negara usia produktif, yaitu 15-59 tahun yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi yang diperoleh datanya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 935.003 orang (55,38%). Diperoleh dari data skrining kesehatan terkait penyakit tidak menular dan edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana yang dilakukan pada penduduk usia produktif di fasilitas pelayanan kesehatan. Meningkat dari tahun lalu, namun masih jauh dari target 100%, dikarenakan masih ada kendala yang dihadapi antara lain masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya skrining kesehatan secara berkala terutama deteksi dini leher rahim dan payudara pada wanita usia subur, sehingga meskipun kegiatan sudah diusahakan mudah diakses tetap saja belum dapat memenuhi target capaian 100%. Oleh karenanya diperlukan keterlibatan lintas program dan lintas sektor dalam rangka peningkatan capaian pada SPM Usia Produktif mengingat sasaran usia produktif di Kota Bekasi yang jumlahnya sangat banyak. Selain itu, masih ada kendala teknis penginputan di aplikasi SIPTM. Kegiatan yang telah dilakukan adalah peningkatan kapasitas baik petugas puskesmas maupun kader posbindu, juga kepada anak sekolah berupa workshop edukasi tentang Ca Serviks, Elektrokardiogram, Upaya Berhenti Merokok dan Penyakit Tidak Menular itu sendiri, serta pelaksanaan skrining kesehatan deteksi dini faktor risiko di tempat-tempat kerja/tempat-tempat umum di wilayah kerja puskesmas dan sekolah, validasi data PTM dan OJT SPM Usia Produktif.

20. Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan

Tahun 2024 terdapat 259.100 warga negara usia 60 tahun keatas yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi yang diperoleh datanya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 241.641 orang (93,26%). Meskipun meningkat dari tahun lalu, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan capaian pelayanan kesehatan lansia belum memenuhi target 100%, diantaranya

adanya keterbatasan pada lansia untuk datang memeriksakan kesehatan di posbindu, sehingga perlu diadakan sweeping oleh kader. Kegiatan yang sudah dilakukan untuk meningkatkan capaian SPM Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut adalah Supervisi Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut di Puskesmas, Validasi Data, Pengadaan Buku Kesehatan Lansia, monitoring dan evaluasi kegiatan Sekolah Lansia dan Penguatan upaya Kesehatan lansia tingkat Kota.

21. Persentase Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan

Tahun 2024 terdapat 171.949 penderita hipertensi yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi yang dihitung berdasarkan perhitungan rumus prevalensi hipertensi (Riskesdas 2018) dan jumlah penduduk yang menggunakan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Berdasarkan laporan pelayanan di puskesmas, jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 136.003 orang (79,09%). Meningkat dari tahun lalu, namun kendala yang ada dilapangan masih serupa dengan tahun lalu, antara lain masyarakat penderita hipertensi masih banyak yang belum memanfaatkan pelayanan kesehatan secara rutin. Sehingga perlu mengoptimalkan lagi edukasi kepada masyarakat tentang pemantauan kesehatan penderita hipertensi secara teratur, memperbanyak kunjungan rumah untuk melakukan pemeriksaan penderita hipertensi.

22. Persentase Warga Negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan

Tahun 2024 terdapat 44.010 penderita diabetes melitus yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi yang dihitung berdasarkan perhitungan rumus prevalensi diabetes (Riskesdas 2018) dan jumlah penduduk yang menggunakan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 44.010 orang (100%). Kegiatan yang sudah dilakukan dalam pencapaian SPM pada penderita DM adalah deteksi dini diabetes mellitus pada kampanye Hari Diabetes Sedunia, edukasi dan penyediaan serta pendistribusian alat dan bahan penunjang

pemeriksaan. Meskipun capaian sudah tercapai namun kendala yang dialami adalah Aplikasi SIPTM yang sering bermasalah pada saat pengambilan data untuk pelaporan.

23. Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan

Tahun 2024 terdapat 4.440 penderita ODGJ yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi. Berdasarkan laporan pelayanan di Puskesmas jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah 4.321 orang (97,32%). Berikut adalah kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan pelayanan kasus kesehatan jiwa serta terlaksananya program pemerintah berdasarkan Permenkes No. 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yaitu kegiatan monev pemantauan pasien di panti rehabilitasi di Kota Bekasi, rapat koordinasi Tim TPKJM TK Kota Bekasi, monev dan validasi program kesehatan jiwa, perencanaan kebutuhan obat psikofarmaka di Kota Bekasi, Monev pelayanan kesehatan sesuai standar bagi pengelola program kesehatan jiwa puskesmas, dan Pendampingan evakuasi pasien ODGJ ke rumah sakit rujukan. Belum tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat di Kota Bekasi disebabkan belum maksimalnya pelaksanaan skrining kesehatan jiwa ke fasyankes, lembaga pendidikan, tempat kerja, lapas/ rutan, panti sosial, lembaga rehabilitasi dan masyarakat (UKBM). Belum optimalnya tenaga kesehatan melaksanakan kunjungan rumah. Masih minimnya pemeriksaan keswa di posyandu dan posbindu.

24. Persentase Warga Negara penderita terduga Tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan

Tahun 2024 terdapat 53.886 orang terduga TBC yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan di Kota Bekasi, terlayani 53.886 orang (100%). Pada tahun 2024, SPM TBC di Kota Bekasi sudah mencapai target, namun pada saat penerapannya ditemukan beberapa permasalahan, yakni :

- TBC masih mendapatkan stigma negative dari masyarakat sehingga masyarakat yang menderita TBC enggan datang ke Puskesmas untuk berobat.
- Terduga TBC sudah diberikan pot dahak untuk menampung dahak pagi, namun terduga TBC tidak dapat mengeluarkan dahak sehingga pot yang sudah diberikan

tidak kembali.

- Terdapat keterbatasan kartrid TCM karena: Barang Import dan pembeliannya melalui pemesanan terlebih dahulu. Saat ini pengadaan katriid TCM secara nasional hanya dilakukan oleh PT. Medquest.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target SPM Tuberkulosis di Kota Bekasi diantaranya memaksimalkan kegiatan Investigasi Kontak di fasilitas pelayanan Kesehatan, memaksimalkan penyuluhan sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat untuk dapat memeriksakan suspek TBC ke fasilitas pelayanan Kesehatan, meningkatkan keterlibatan lintas sektor dalam penanggulangan TBC baik tingkat Kecamatan maupun tingkat Kota.

25. Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Tahun 2024 terdapat 87.622 orang yang terpetakan dan mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (100%). Pada tahun ini target SPM HIV telah tercapai hasil kolaborasi bersama antara lintas program yang ada di Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Fasyankes, termasuk dukungan dari LSM Penggiat HIV dalam menjangkau sasaran populasi kunci yang berisiko terinfeksi HIV dapat melakukan tes HIV. Namun, dalam pelaksanaan ditemukan beberapa kendala khususnya untuk tes mobile HIV di tempat populasi kunci berkumpul terdapat kesulitan untuk dapat akses melakukan tes HIV berkala untuk mengetahui status kesehatannya. Selain itu pencatatan dan pelaporan orang yang di tes HIV belum semua di isi sesuai faktor risiko nya (misal ibu hamil atau pasien TB di input sebagai populasi umum)

- * Mempertahankan capaian yang telah baik, serta mendorong keterlibatan lintas sektor dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan risiko orang terinfeksi HIV di Kota Bekasi pada semua sasaran orang berisiko terinfeksi HIV
- * Dinas Kesehatan Kota Bekasi melakukan monitoring & evaluasi secara berkala setiap bulan kepada fasyankes untuk memastikan orang yang di tes HIV dan yang di input ke dalam aplikasi SIHA 2.1 sesuai faktor risiko nya, dan mendorong tim hiv di fasyankes melakukan validasi rutin & kolaborasi dengan

lintas program yang ada di fasyankes untuk verifikasi capaian tes HIV (contoh: ibu hamil / pasien tb yg di tes HIV).

26. Persentase jumlah sarana kefarmasian yang memenuhi standar kesehatan

Terlayani :153 Sasaran :158 (ada 5 sarana kefarmasian yang tidak memenuhi standar karena tidak memberikan kelengkapan sebagai bukti perbaikan hasil pemeriksaan

27. perpersentase jumlah produk pangan industri rumah tangga(PIRT) berlabel yang memenuhi standar kesehatan

Terlayani :150 Sasaran :150

28. persentase ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas dan RS

Terdapat penambahan 3 Puskesmas baru dan belum ada rekrutmen untuk penambahan SDM kesehatan

C. Capaian Kinerja Keuangan

a. Anggaran Belanja Pada Dinas Kesehatan

Jumlah Anggaran Belanja Pada Dinas Kesehatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Tabel Anggaran Belanja Pada Dinas Kesehatan Tahun 2024

No	Program	Pagu Renja Murni			Pagu KUAPPAS			APBD PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
		Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	24	261.761.194.746	8	26	255.424.594.746	8	26	255.424.594.746	(6.336.600.000,-)	
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3	95	350.350.642.304	4	839	526.050.698.262	4	839	541.017.638.122	179.200.055.958,-	Terdapat Penambahan Pagu saat pembahasan KUAPPAS Perubahan dan Penetapan APBD Perubahan Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Program	Pagu Renja Murni			Pagu KUAPPAS			APBD PERUBAHAN			Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
		Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)		
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	3	49.067.709.600	2	3	50.778.093.600	2	3	50.778.093.600	1.710.384.000,-	
4	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	2	2	187.400.000	2	2	187.400.000	2	2	187.400.000	-	
5	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2	2	14.001.999.989	3	45	15.175.470.989	3	45	15.175.470.989	1.173.471.000,-	
		17	126	675.368.946.639	19	915	847.616.257.597	19	915	862.583.197.457	187.214.250.818	

Sumber Data : Olahan Data SIPD Kota Bekasi , 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat penambahan Pagu Anggaran dari pagu anggaran murni Dinas Kesehatan yang semula Rp. 675.368.946.639,- (terdiri dari 17 kegiatan dan 126 Sub Kegiatan) bertambah saat proses Perubahan APBD menjadi Rp. 862.583.197.187.457 (terdiri dari 19 kegiatan 915 Sub Kegiatan) dan proses APBD Perubahan. Berdasarkan rencana kerja Dinas Kesehatan Perubahan Tahun 2024 terdapat perbedaan pagu saat penetapan APBD-Perubahan, dikarenakan setelah penetapan RKPD terdapat pembahasan KUA-PPAS terdapat penambahan pagu pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi perubahan RKPD pada Dinas Kesehatan, antara lain :

- ✓ Penambahan SILPA BLUD Tahun 2023 dan Penambahan/Pengurangan Pendapatan 2024
- ✓ Penambahan Anggaran Sumber dana Non APBD(DAK Fisik, Non Fisik, Bantuan Provinsi DKI (Murni Dan Luncuran) Bantuan Prov Jawa Barat, DBCHT (Murni dan SILPA), SILPA DAU dan Insentif Fiskal.
- ✓ Pemenuhan Kebutuhan Operasional Dinas Kesehatan, RSUD Kelas D dan Puskesmas

Pemanfaatan anggaran belanja pada Dinas Kesehatan sesuai dengan sumber pendanaannya dapat diketahui pada tabel di bawah ini

Tabel 3.6 Pemanfaatan Anggaran Kesehatan Tahun 2024

NO	SUMBER DANA	MURNI	PERUBAHAN
1	Bantuan Keuangan DKI Jakarta	-	- Pengadaan Alat Kesehatan - pengadaan sarana prasarana - Pengadaan Obat, bahan habis pakai

NO	SUMBER DANA	MURNI	PERUBAHAN
2	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dinas Kesehatan Dan Puskesmas	-	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan BMHP untuk pendukung SPM Kesehatan - Anggaran untuk penunjang program prioritas Nasional seperti penyediaan PMT untuk penanggulangan stunting - Dukungan anggaran untuk upaya promotif dan preventif - Dukungan anggaran untuk kegiatan pelayanan luar gedung Puskesmas - Pemenuhan pelayanan UKM esensial yaitu KIA, pelayanan gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan - Penyediaan anggaran untuk pelatihan pengembangan kompetensi Nakes
3	Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat	-	Penyediaan Jaminan Kesehatan
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan	-	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit - Penyediaan sarana dan Prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit
5	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	-	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Kelas D - Penyediaan Alat Kesehatan untuk Labkesda
6	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<p>belanja penunjang urusan dan belanja urusan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dengan rincian antara lain</p> <ul style="list-style-type: none"> ' - Operasional Puskesmas dan Rumah Sakit - pengadaan alat kesehatan, 	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahan Anggaran untuk belanja penunjang urusan dan belanja urusan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan - Penambahan biaya gaji dan tunjangan ASN

NO	SUMBER DANA	MURNI	PERUBAHAN
		sarana dan prasarana - penyediaan gaji dan tunjangan - Pembiayaan sub kegiatan yang berkaitan dengan SPM dan tugas serta fungsi dari Dinas Kesehatan	
7	Insentif Fiskal	-	- Penyediaan anggaran untuk mendukung program penanggulangan stunting
8	Pendapatan Dana BLUD	Pembayaran jasa pelayanan dan belanja operasional BLUD	- Penambahan Estimasi Pendapatan dan SILPA Pendapatan tahun sebelumnya yang digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan dan belanja operasional BLUD

Sumber Data : Rekapitulasi Usulan Anggaran Perubahan, 2024

Akuntabilitas keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi didasarkan pada penyerapan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Adapun rincian realisasi belanja berdasarkan jenis belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7 Tabel Realisasi Anggaran Per Program Pada Dinas Kesehatan Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN	
			OPERASI		MODAL	TOTAL		%
			PEGAWAI	BARANG & JASA				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	255.424.594.746,00	206.709.219.464	10.725.622.231	19.162.292.000	236.597.133.695	92,63	18.827.461.051
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	541.017.638.122,00	41.039.637.730	389.751.915.648	47.367.078.423	478.158.631.801	88,38	62.859.006.321
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	50.778.093.600,00	-	48.215.247.645	-	48.215.247.645	94,95	2.562.845.955

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN	
			OPERASI		MODAL	TOTAL		%
			PEGAWAI	BARANG & JASA				
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	187.400.000,00	-	184.076.000	-	184.076.000	98,23	3.324.000
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	15.175.470.989,00	-	15.073.279.300	-	15.073.279.300	99,33	102.191.689
TOTAL		862.583.197.457,00	247.748.857.194,00	463.950.140.824,00	66.529.370.423,00	778.228.368.441,00	90,22	84.354.829.016,00

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui realisasi anggaran dinas kesehatan sebesar 90,22% (dari pagu anggaran Rp. 862.583.197.457,- terserap Rp. 778.228.368.441,-) yang masih kurang maksimal ada pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar 88,38 % (dari pagu Rp. 541.017.638.122,- terserap Rp. 478.158.631.801,-). Beberapa hal yang menyebabkan capaian realisasi pada program ini rendah selain adanya efisiensi anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat pagu anggaran dari kementerian kesehatan untuk sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan yang bukan merupakan usulan saat desk sehingga tidak diserap ;
- b. Kegiatan Sumber dana DAK Non Fisik yang sifat nya pelacakan kasus masih ada yang realisasinya tidak 100% karena kegiatan tersebut dikerjakan jika ada kasus yang harus ditangani;
- c. Pengadaan sarana berupa penambahan ruag rawat inap standar KRIS bersumber dana DAK Fisik tidak terserap karena terdapat kendala saat proses pengadaan sehingga tender ulang yaang menyebabkan waktu tidak mencukupi untuk pemenuhan dokumen SPK sebagai syarat untuk penyaluran anggaran;
- d. Pengadaan IPAL sumber dana DAK Fisik di Puskesmas Bintara tidak terserap karena tahun 2024 bangunan puskesmas Bintara selesai direhab dab sudah termasuk adanya bangunan untuk IPAL
- e. Sub Kegiatan yang bersumber dana Bantuan DKI pada RSUD Kelas D ada beberapa yang tidak dilaksanakan karena barang yang tidak terseedia, Adanya Efisiensi Belanja Tahun ini dan pada sumber anggaran bantuan DKI efisiensi pembelanjaan Tahun-tahun sebelumnya masih diakui sebagai pagu anggaran bukan sebagai SILPA, sehingga berpengaruh terhadap perhitungan akhir realisasi penyerapan anggaran
- f. Barang yang tidak tersedia pada saat proses pengadaan barang
- g. Kendala spesifikasi barang yang harus sesuai dengan ketentuan TKDN

b. Pendapatan Pada Dinas Kesehatan

Pendapatan pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi berasal dari beberapa sumber, Adapun sumber pendapatan tersebut berasal dari : Retribusi Pelayanan Kesehatan di

Puskesmas, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya Yang Sejenis, Retribusi Pemakaian Laboratorium dan Pendapatan BLUD. Realisasi berdasarkan sumber pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.8 Realisai Pendapatan Berdasarkan Sumber Pendapatan Pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2024

NO	URAIAN	TARGET PAD PERUBAHAN	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2024		SISA LEBIH / KURANG	KETERANGAN
		TA.2024	Rp	%	Rp	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	18.879.000,00	24.155.000,00	127,95	5.276.000	LEBIH
2	Retribusi Pemakaian Laboratorium	765.560.000,00	1.449.038.500,00	189,28	683.478.500	LEBIH
3	Pendapatan BLUD Puskesmas	70.063.613.367,00	70.066.865.417	100,00	3.252.050	LEBIH
4	Pendapatan BLUD RSUD TYPE D	30.200.000.000,00	34.944.235.590,00	115,71	4.744.235.590	LEBIH
	JUMLAH	101.048.052.367,00	106.484.294.507,00	105,38	5.436.242.140	LEBIH

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan Dinas Kesehatan melebihi target pendapatan yang telah di tetapkan yaitu sebesar 105,38% (Rp. 106.484.294.507,- dari target Rp. 101.048.052.367,-), realisasi tersebut di peroleh dari penerimaan pendapatan yang berasal dari pendapatan BLUD.

Adapun Rincian Pendapatan BLUD tersebut dapa diketahui dari tabel dibawah ini.

Tabel 3.9 Realisai Pendapatan Berdasarkan Unit Kerja Pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2024

NO	NAMA	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	%
A	PUSKESMAS			
1	AREN JAYA	Rp 2.109.764.952	Rp 2.137.689.728	101%
2	BANTAR GEBANG	Rp 2.290.640.008	Rp 2.349.087.160	103%

NO	NAMA	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	%
3	BINTARA	Rp 1.578.992.756	Rp 1.645.101.414	104%
4	BINTARA JAYA	Rp 1.796.213.320	Rp 1.813.810.485	101%
5	BOJONG MENTENG	Rp 1.524.000.000	Rp 1.536.743.097	101%
6	BOJONG RAWA LUMBU	Rp 2.170.132.848	Rp 2.381.363.232	110%
7	DUREN JAYA	Rp 1.723.886.126	Rp 1.853.391.020	108%
8	JAKA MULYA	Rp 1.147.127.300	Rp 1.202.554.092	105%
9	JATI ASIH	Rp 4.700.000.000	Rp 4.687.207.466	100%
10	JATI BENING	Rp 1.963.041.606	Rp 1.909.725.137	97%
11	JATI LUHUR	Rp 1.945.000.000	Rp 1.977.389.105	102%
12	JATI MAKMUR	Rp 1.869.564.799	Rp 1.686.007.650	90%
13	JATI RAHAYU	Rp 2.292.116.277	Rp 2.316.263.526	101%
14	JATI SAMPURNA	Rp 2.734.466.981	Rp 2.833.037.176	104%
15	JATI WARNA	Rp 1.887.220.187	Rp 1.765.227.780	94%
16	KA. TENGAH	Rp 2.164.800.806	Rp 2.139.273.848	99%
17	KARANG KITRI	Rp 2.263.773.848	Rp 2.338.866.137	103%
18	KOTA BARU	Rp 1.321.293.248	Rp 1.367.004.177	103%
19	KRANJI	Rp 1.426.792.855	Rp 1.418.194.820	99%
20	MARGA JAYA	Rp 1.129.963.424	Rp 748.243.708	66%
21	MARGA MULYA	Rp 1.050.119.635	Rp 1.184.749.020	113%
22	MUSTIKA JAYA	Rp 4.034.290.000	Rp 4.091.130.630	101%
23	PEJUANG	Rp 2.967.513.173	Rp 2.751.413.206	93%
24	PEKAYON JAYA	Rp 2.218.999.231	Rp 2.432.287.756	110%
25	PENGASINAN	Rp 1.177.873.000	Rp 1.335.169.085	113%
26	PERUMNAS II	Rp 1.372.993.800	Rp 1.416.540.236	103%
27	PONDOK GEDE	Rp 3.805.600.000	Rp 3.590.455.374	94%

NO	NAMA	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	%
28	RAWA TEMBAGA	Rp 2.154.648.804	Rp 1.913.404.523	89%
29	SEROJA	Rp 2.006.601.806	Rp 1.854.846.852	92%
30	TELUK PUCUNG	Rp 2.052.126.854	Rp 1.834.347.222	89%
31	BEKASI JAYA	Rp 1.667.664.000	Rp 1.639.922.965	98%
32	CIKETING UDIK	Rp 456.000.000	Rp 552.584.202	121%
33	CIMUNING	Rp 540.000.000	Rp 537.924.603	100%
34	HARAPAN BARU	Rp 340.773.717	Rp 354.269.112	104%
35	JAKASETIA	Rp 655.522.042	Rp 696.317.760	106%
36	JATI RANGGON	Rp 600.000.000	Rp 606.432.193	101%
37	JATIBENING BARU	Rp 24.095.964	Rp 89.088.561	370%
38	KALI BARU	Rp 750.000.000	Rp 771.932.222	103%
39	MUSTIKA SARI	Rp 10.000.000	Rp 9.920.000	99%
40	PADURENAN	Rp 990.000.000	Rp 1.001.554.609	101%
41	PERWIRA	Rp 672.000.000	Rp 780.399.030	116%
42	SUMUR BATU	Rp 478.000.000	Rp 515.995.498	108%
	JUMLAH	Rp 70.063.613.367	Rp 70.066.865.417	100%
B	RSUD TYPE D			
1	RSUD TIPE D BANTARGEBAH	Rp 6.500.000.000	Rp 6.887.809.700	106%
2	RSUD TIPE D JATISAMPURNA	Rp 14.800.000.000	Rp 13.558.457.955	92%
3	RSUD TIPE D PONDOK GEDE	Rp 8.000.000.000	Rp 11.469.319.506	143%
4	RSUD TELUK PUCUNG	Rp 900.000.000	Rp 3.028.648.429	337%
	JUMLAH	Rp 30.200.000.000	Rp 34.944.235.590	116%
	TOTAL	Rp 100.263.613.367	Rp 105.011.101.007	105%

Sumber Data Sub Bagian Keuangan, 2024

Berdasarkan Tabel Diatas Dapat Diketahui Bahwa Ada 13 Puskesmas yang realisasi pendapatannya masih dibawah 100%. Puskesmas Tersebut Antara Lain: Puskesmas Jati Bening, Jati Makmur, Jati Warna, Kaliabang Tengah, Kranji Marga Jaya, Pejuang, Pondok Gede, Rawa Tembaga, Seroja, Teluk Pucung, Bekasi Jaya dan Mustika Sari. Dan 1 Rumah Sakit Kelas D yaitu RSUD Kelas D Jati Sampurna.

c. ANALISIS ANGGARAN BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS

Analisis Anggaran berdasarkan sasaran strategis yang di tetapkan oleh Dinas Kesehatan dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.10. Analisis Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2024

NO	SASARAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	255.424.594.746,-	236.597.133.695,-	92,63
2	Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi yang Sehat	607.158.602.711,-	541.631.234.746,-	89,21
TOTAL		862.583.197.457,-	778.228.368.441,-	90,22

Sumber Data Pengolahan data dari Aplikasi SIPD Kota Bekasi Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran pertama “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja” dialokasikan anggaran Rp 255.424.594.746,- dengan realisasi Rp 236.597.133.695,- (92,63%). Sedangkan untuk mencapai sasaran kedua “Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi yang Sehat” dialokasikan anggaran Rp 607.158.602.711,- dengan realisasi Rp 541.631.234.746 (89,21), dengan total realisasi sebesar 90,22% (dari pagu total Rp, 862.583.197.457,- realisasi 778.228.368.441,-. Mengalami kenaikan dari tahun 2023 yang semula 88.79% menjadi 90,22%.

d. ANALISIS ANGGARAN BERDASARKAN CAPAIAN INDIKATOR SASARAN DAN PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN

Analisis anggaran berdasarkan capaian indikator sasaran dan pemetaan program/kegiatan dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.11. Analisis Anggaran Berdasarkan Capaian Indikator Sasaran Dan Pemetaan Program/Kegiatan

NO	CAPAI AN INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 255.424.594.746,00	Rp 236.597.133.695,00	92,63
	Nilai AKIP		79 Nilai	80,67 Nilai	
			Rp 222.703.681.000,00	Rp 206.776.429.464,00	92,85
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 50.000.000,00	Rp 48.270.000,00	96,54
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 222.653.681.000,00	Rp 206.728.159.464,00	92,85
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan kesehatan		80 Indeks	83,83 Indeks	
			Rp 32.720.913.746,00	Rp 29.820.704.231,00	91,14
1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 637.400.000,00	Rp 610.947.500,00	95,85
2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 931.000.000,00	Rp 842.900.159,00	90,54
3		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 21.664.233.266,00	Rp 19.165.602.000,00	88,47
4		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rp 8.616.910.480,00	Rp 8.405.701.664,00	97,55

NO	CAPAIAN INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
		Pemerintahan Daerah			
5		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 725.000.000,00	Rp 650.840.908,00	89,77
6		Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 146.370.000,00	Rp 144.712.000,00	98,87
	Usia Harapan Hidup (UHH)		75,47 Tahun	76,14 Tahun	
			Rp 607.158.602.711,00	Rp 541.631.234.746,00	89,21
2		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 541.017.638.122,00	Rp 478.158.631.801,00	88,38
1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 91.538.685.703,00	Rp 66.548.714.106,00	72,70
2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 444.931.096.014,00	Rp 411.182.938.695,00	92,41
3		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rp 4.063.321.000,00	Rp 25.656.000,00	0,63
4		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan	Rp 484.535.405,00	Rp 401.323.000,00	82,83

NO	CAPAI AN INDIK ATOR SASAR AN	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
		Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 50.778.093.600,00	Rp 48.215.247.645,00	94,95
5		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 48.582.109.600,00	Rp 46.382.962.645,00	95,47
6		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.195.984.000,00	Rp 1.832.285.000,00	83,44
4		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp 187.400.000,00	Rp 184.076.000,00	98,23
7		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp 100.000.000,00	Rp 98.900.000,00	98,90

NO	CAPAIAN INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
8		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Rp 87.400.000,00	Rp 85.176.000,00	97,46
5		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 15.175.470.989,00	Rp 15.073.279.300,00	99,33
9		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.651.999.989,00	Rp 13.577.900.000,00	99,46
10		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 350.000.000,00	Rp 338.645.700,00	96,76
11		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.173.471.000,00	Rp 1.156.733.600,00	98,57
TOTAL			Rp 862.583.197.457,00	Rp 778.228.368.441,00	90,22

Sumber Data Pengolahan data dari Aplikasi SIPD Kota Bekasi Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai indikator sasaran pertama yaitu “nilai AKIP” didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 Kegiatan yang terkait dengan realisasi anggaran sebesar 92,85% (target Rp. 222.703.681.000,- realisasi Rp. 206.776.429.464,-).

Untuk mencapai sasaran indikator kedua “Indeks Kepuasan Masyarakat

terhadap layanan kesehatan” didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 Kegiatan yang terkait dengan realisasi anggaran sebesar 91,14% (target Rp 32.720.913.746,- realisasi Rp 29.820.704.231,-).

Untuk mencapai sasaran indikator ketiga “Usia Harapan Hidup” 4 Program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang terdiri dari 11 Kegiatan yang terkait dengan realisasi anggaran sebesar 89.21% (target Rp 607.158.602.711,- realisasi Rp Rp 541.631.234.746,-).

e. EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator Sasaran pada Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.12. Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2024

No	Indikator Sasaran/Kebutuhan Anggaran/Efisiensi	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai AKIP	79,00	80,67	102,11
	Anggaran yang dibutuhkan	222.703.681.000,00	206.776.429.464,00	92,85
	Nilai Efisiensi	9,27		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan	80,00	83,83	104,79
	Anggaran yang dibutuhkan	32.720.913.746,00	29.820.704.231,00	91,14
	Nilai Efisiensi	13,65		
3	Usia Harapan Hidup	75,47	76,14	100,89
	Anggaran yang dibutuhkan	607.158.602.711,00	541.631.234.746,00	89,21
	Nilai Efisiensi	11,68		

Sumber Data Pengolahan data dari Aplikasi SIPD Kota Bekasi Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk pencapaian indikator pertama “Nilai AKIP” mempunyai nilai efisiensi sebesar 9,27 rendah dari tahun

2023 (16.67), untuk pencapaian indikator kedua “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan” mempunyai nilai efisiensi sebesar 13,65 lebih rendah dari tahun 2023 (17.19) dan untuk pencapaian indikator ketiga “Usia Harapan Hidup” mempunyai nilai efisiensi 11,68 lebih tinggi dari tahun 2023 (11.40)

D. PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS YANG MENDUKUNG CAPAIAN IKU

Program prioritas yang mendukung untuk mewujudkan peningkatan Indikator Kinerja Utama Usia Harapan Hidup antara lain adalah Program Penurunan Prevalensi Stunting dan Penyelenggaraan Kota Sehat. Dimana Prevalensi Stunting merupakan proyek strategis yang tertuang pada RPJMN tahun 2020-2024.

1. Program Penurunan Prevalensi Stunting

Stunting adalah Kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) pada yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan.

Persentase stunting diperoleh berdasarkan hasil entry pengukuran balita bulan September di elektronik Pengukuran Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Berdasarkan hasil entry tersebut dapat kita tarik data

- Persentase tahun 2020 sebesar 10.55% (dari Target 10.20%)
- Persentase stunting 2021 sebesar 7.87% (dari Target 10.00%)
- Persentase stunting 2022 sebesar 3.44% (dari Target 9.80%)
- Persentase stunting 2023 sebesar 2.99% (dari Target 9.50%)
- Persentase stunting 2024 sebesar 2.89 % (dari Target 7.82%)

Gambar 3.1

Grafik Prevalensi Stunting Kota Bekasi Tahun 2020-2024



Upaya Penanganan Stunting di Kota Bekasi

Salah satu kegiatan yang kita fokuskan selama ini adalah memvalidasi data hasil pengukuran balita, disisi lain Dinas Kesehatan Kota Bekasi juga telah melakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif terkait dengan percepatan penanganan kasus stunting.

a. Intervensi Spesifik (Sektor Kesehatan 30%):

1. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri. Pemberian TTD dilakukan pada remaja putri mulai dari usia 12-18 tahun di institusi Pendidikan pada jenjang SMP dan SMA. Capaian program pemberian TTD. Saat ini, program pemberian tablet tambah darah telah mencapai 65,17 % dari target yang diharapkan sebesar 90%.
2. Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal (PMT) Bagi Balita Gizi Kurang dan Ibu Hamil KEK. Kegiatan PMT Lokal merupakan salah satu intervensi spesifik bagi balita gizi kurang. Kegiatan PMT Lokal khususnya di Kota Bekasi dilaksanakan di seluruh Puskesmas di Kota Bekasi pada triwulan III, dengan sasaran Balita Gizi Kurang sebanyak 3053 Balita Gizi Kurang dan 547 ibu hamil KeK. Kegiatan PMT Lokal ini melibatkan Tenaga Pelaksana Gizi, Kader Posyandu, dan dukungan warga Masyarakat.
3. Pemberian tablet tambah darah (TTD) pada ibu hamil. Kegiatan pemberian tablet zat besi FE diberikan untuk seluruh ibu hamil dari TM 1 sebanyak 180 tablet fe selama masa kehamilan guna untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil, kegiatan pemberian FE bisa di berikan di TPMB, Puskesmas, Klinik, RS, dan Posyandu pada saat melakukan pemeriksaan ANC ibu hamil. Saat ini, program pemberian tablet tambah darah telah mencapai 82,8% dari target yang diharapkan sebesar 90%
4. Melaksanakan skrining anemia pada remaja putri. Skrining anemia dilakukan pada remaja putri kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA. Skrining Anemia bertujuan untuk deteksi dini anemia pada remaja putri. Capaian program skrining anemia pada remaja putri sampai saat ini yaitu 80,94% dari target 90%
5. Pemeriksaan skrining hypotiroid konginetal (SHK) pada bayi baru lahir dengan capaian saat ini sebesar 47,6% dari target program yaitu 100%

6. Pemberian susu F100 untuk balita gizi buruk dengan capaian yaitu 100% balita gizi buruk diberikan intervensi pemberian susu F100.
7. Pemberian sirup besi untuk balita gizi buruk dengan capaian yaitu 100% balita gizi buruk diberikan intervensi pemberian sirup besi
8. Pemberian tablet tambah darah (TTD) pada calon pengantin
9. Pemenuhan alat antropometri terstandar bagi 1615 posyandu
10. Peningkatan kapasitas nakes melalui pelatihan terstandar : Pelatihan SDIDTK dan PMBA kepada 17 puskesmas, Pelatihan MTBS Gizi buruk kepada 39 Puskesmas
11. Melaksanakan skrining anemia pada remaja putri. Skrining anemia dilakukan pada remaja putri kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA. Skrining Anemia bertujuan untuk deteksi dini anemia pada remaja putri. Capaian program skrining anemia pada remaja putri sampai saat ini yaitu 80,94% dari target 90%
12. Pemeriksaan skrining hypotiroid konginetal (SHK) pada bayi baru lahir dengan capaian saat ini sebesar 47,6% dari target program yaitu 100%
13. Pelaksanaan pemeriksaan kualitas air minum pada 206 sampel
14. Pemberdayaan masyarakat/ pemciuan STBMM di 13 lokasi
15. Penyediaan reagen sanitarian KIT sebanyak 41 paket untuk 41 puskesmas
16. Melakukan Pembinaan germas dalam Upaya pencegahan stunting
17. Melakukan advokasi posyandu terintegrasi
18. Penyediaan media KIE untuk puskesmas
19. Melakukan bimbingan teknis pokjanal
20. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi setiap peserta PBP dan BP Kelas 3 dengan capaian per bulan September sebesar 381.019 jiwa dari target yaitu sebanyak 489.477 Jiwa

b. Intervensi Sensitif (Sektor Non Kesehatan 70%)

1. Diseminasi AKS Kota Bekasi Tahun 2024 dilaksanakan di Aula Balai Patriot pada hari Selasa, 23 Juli 2024. Pembukaan kegiatan oleh Bapak Sekretaris Daerah Junaedi selaku Ketua TPPS Kota Bekasi dengan jumlah Peserta 75 orang dari TPPS Kota Bekasi dan TPPS Kecamatan. Selain itu dihadiri oleh wilayah yang dijadikan lokus untuk pelaksanaan Audit Kasus Stunting (AKS) yaitu Kec.Jatisampurna dan Kec.Bekasi Selatan. Kegiatan ini disampaikan materi oleh Narasumber dari Tim

Pakar Audit Kasus Stunting diantaranya adalah dokter spesialis anak, dokter spesialis obstetric dan ginekologi, ahli gizi dan psikolog.

2. Pelaksanaan Workshop Verval dan Pendataan Keluarga Tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada hari Selasa tanggal 13 September 2024 bertempat di Aula pada 5 lokasi fokus diantaranya adalah Kec. Bekasi Utara, Kec. Pondokgede, Kec. Bekasi Timur, Kec. Mustikajaya dan Kec. Rawalumbu dengan dihadiri oleh 1.493 orang kader dengan masa periode Pendataan Keluarga selama 30 hari.
3. Pembangunan Tangki septik SNI oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui swakelola tipe IV pada program Dana Alokasi Khusus di Kelurahan Jatiluhur sebanyak 20 unit, Kelurahan Jatirangga sebanyak 20 unit, dan Kelurahan Teluk Pucung sebanyak 20 unit melalui Dinas Perkimtan. Pembangunan Tangki Septik Individu bertujuan untuk meningkatkan sanitasi yang aman dan layak serta mengurangi jumlah angka stunting yang ada di Kota Bekasi.
4. Monitoring Penyaluran bantuan penanganan stunting berupa 10 butir telur dan 1 ekor ayam di kec. Jatisampurna, Bekasi Selatan, Mustika Jaya, Jatiasih dan Medan Satria dilaksanakan pada Bulan Juli - September 2024
5. Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman dilaksanakan pada tanggal 1 September 2024 kepada 150 orang anggota PKK
6. Sosialisasi pengenalan pangan lokal dilaksanakan pada tanggal 8 September 2024 kepada 170 orang Kelompok Tani / Wanita Tani dan PKK
7. Pelatihan budidaya ayam petelur pada tanggal 20 September 2024 dan akan diserahkan Paket bantuan budidaya ayam petelur kepada 10 kelompok tani
8. Pelatihan Budidaya Ikan pada tanggal 19 - 20 September 2024 dan akan diserahkan Paket bantuan budidaya ikan kepada 6 kelompok tani.

Gambar 3.2 Dokumentasi Program Penurunan stunting

Intervensi Spesifik Sektor Kesehatan (30%)



Pelayanan KB dalam rangka momentum Hari Kesehatan Nasional ke 60 di Kota Bekasi, dilaksanakan pada hari jumat, 1 November 2024 di Klinik Ratna Komala Kecamatan Rawalumbu. Target 132 sasaran terlayani pelayanan KB dengan rincian 100 orang IUD dan 32 Implant.



Pemberian bantuan pangan lokal melalui DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) di Kampung KB Kemuning Kel. Kalibaru Kec. Medansatria. Sasaran sebanyak 20 anak Baduta (0-23 bulan). Pemberian dilakukan selama 30 hari didistribusikan oleh Kader Kampung KB.



Pendampingan proses Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 di Kota Bekasi dengan sasaran 82 Blok Sensus. Tim Enumerator didampingi oleh Tim TPPS Kecamatan dan Kader.



Kegiatan PMT Lokal merupakan salah satu intervensi spesifik bagi balita gizi kurang. Kegiatan PMT Lokal khususnya di Kota Bekasi dilaksanakan di seluruh Puskesmas di Kota Bekasi, dengan sasaran Balita Gizi Kurang sebanyak 2372 Balita. Kegiatan PMT Lokal ini melibatkan Tenaga Pelaksana Gizi, Kader Posyandu, dan dukungan warga masyarakat



Kegiatan pemberian Vitamin A merupakan kegiatan yang wajib dan rutin dilakukan pada bulan Februari dan Agustus, yang dilaksanakan di seluruh kota Bekasi, dengan sasaran anak 6-11 bulan untuk Vit A biru, dan Anak 12-59 Bulan untuk Vit A merah



Pengukuran berat badan dan tinggi badan merupakan bagian dari upaya rutin dalam memantau tumbuh kembang anak-anak, khususnya balita yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali di posyandu.



Seluruh balita yang memiliki masalah gizi, mendapatkan perawatan, melalui rujukan ke Puskesmas dan rujukan ke Rumah sakit



Intervensi Sensitif Sektor Non Kesehatan (70%)



Peningkatan Kapasitas TPPS tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2024 dilaksanakan di Aula Balai Patriot pada hari Senin, 4 November 2024. Pembukaan kegiatan oleh Bapak R. Gani Muhammad Pj Wali Kota Bekasi selaku Ketua Pengarah TPPS Kota Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh unsur terkait sebanyak 247 orang peserta (100% terpenuhi sesuai jumlah sasaran undangan TPPS). Pada kegiatan ini disampaikan materi oleh narasumber dari Sekretariat Pelaksana PPS Pusat dan Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Rapat Koordinasi TPPS Kota Bekasi di ruang rapat Pj. Wali Kota pada hari Rabu, 9 Oktober 2024. Rapat Koordinasi terbatas dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi tentang Persiapan Pelaksanaan SSGI Tahun 2024 di Kota Bekasi dengan lokasi fokus 82 BS. Pertemuan terbatas ini juga dihadiri oleh PJT Kota Bekasi mewakili tim enumerator.

Rapat Koordinasi TPPS Kecamatan Bekasi Barat dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Desember 2024 bertempat di Aula Kecamatan Bekasi Barat (Gedung Belakang Aula Kecamatan). Kegiatan ini dihadiri oleh unsur TPPS Kota, TPPS Kecamatan dan TPPS Kelurahan. Kegiatan ini merupakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TPPS.



Orientasi Kartu Menuju Sehat (KMS) dan Kartu Kembang Anak (KKA) bagi kader di Posyandu Se-Kota Bekasi. Pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi 2 Pelaksanaan total keseluruhan sebanyak 276 kader, dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober dan 29 Oktober 2024 di Balai Patriot.

Promosi dan Sosialisasi KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran bagi Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta se-Kota Bekasi, dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024 dihadiri sebanyak 150 orang terdiri dari Dokter Umum dan Bidan.

Promosi dan Sosialisasi KIE terhadap PUS Hamil dan PUS tentang Penggunaan 7 Metode Kontrasepsi Khususnya MKJP, dengan sasaran 20 orang diseluruh kecamatan.

Disperkiman telah membangun tangki septik SNI oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui swakelola tipe IV pada program Dana Alokasi Khusus di Kelurahan Jatiluhur sebanyak 20 unit, Kelurahan Jatirangga sebanyak 20 unit, dan Kelurahan Teluk Pucung sebanyak 20 unit. Pembangunan Tangki Septik Individu ini bertujuan untuk meningkatkan sanitasi yang aman dan layak serta mengurangi jumlah angka stunting yang ada di Kota Bekasi.



2. Penyelenggaraan Kota Sehat

Kota sehat adalah kondisi kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni. Kota sehat dicapai melalui penerapan tatanan dan kegiatan yang terintegrasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Tujuan kota sehat antara lain: menjamin kesehatan masyarakat, mewujudkan kota yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk dihuni dan bekerja, memberdayakan masyarakat dan memfasilitasi masyarakat oleh pemerintah daerah.

Penyelenggaraan kota sehat Melakukan berbagai kegiatan, Memfungsikan lembaga masyarakat yang ada, Melakukan gerakan masyarakat untuk mandiri menciptakan kesehatan. Beberapa Strategi Mewujudkan Kota Bekasi Sehat, adalah

sebagai berikut :

1. Pembangunan Jamban Sehat di 12 Kelurahan bersumber dana DAK Perkimtan Tahun 2023
2. Pembangunan Jamban Sehat di 6 Kelurahan bersumber dana DBHCHT Perkimtan Tahun 2023
3. Pembangunan Jamban Sehat di 11 Kelurahan bersumber dana Perkimtan APBD 2023
4. Pemicuan di wilayah yang belum ODF oleh Dinas Kesehatan
5. Advokasi Kemitraan bidang kesehatan oleh Dinas Kesehatan
6. Pembentukan Kelembagaan
7. Penyediaan Sarana Dan Prasarana
8. Sinergi Kolaborasi Integrasi
9. Advokasi Kota Bekasi Sehat
10. Promosi Kesehatan

Salah satu indikator yang menjadi penilaian kota sehat dan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan yaitu *Open Defecation Free (ODF)* atau Stop Buang Air Besar Sembarangan yang sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan sebagaimana data dalam tabel berikut:

Tabel 3.13 Data Jumlah KK yang Belum Memiliki Jamban Layak/ Masih BABS Per Kelurahan di Kota Bekasi Tahun 2024 dan Data Kelurahan ODF

N O	KELURAHAN	JUMLAH KK	JML KK YG MASIH BABS	KET
	KEC. JATISAMPURNA	32.164	323	
1	JATI SAMPURNA	7.989	99	Deklarasi ODF
2	JATI RANGGA	5.398	149	Deklarasi ODF
3	JATI KARYA	4.674	-	Bebas ODF
4	JATI RADEN	6.234	59	Deklarasi ODF
5	JATI RANGGON	7.869	16	Deklarasi ODF
	KEC. PONDOK MELATI	34.014	403	
6	JATI RAHAYU	11.660	65	Deklarasi ODF

N O	KELURAHAN	JUMLAH KK	JML KK YG MASIH BABS	KET
7	JATI WARNA	7.490	103	Deklarasi ODF
8	JATI MELATI	6.446	201	Deklarasi ODF
9	JATI MURNI	8.418	34	Deklarasi ODF
	KEC. BEKASI SELATAN	60.054	222	
10	PEKAYON JAYA	17.888	37	Deklarasi ODF
11	JAKA MULYA	11.259	66	Deklarasi ODF
12	JAKA SETIA	13.556	46	Deklarasi ODF
13	KAYURINGIN JAYA	13.980	-	Bebas ODF
14	MARGA JAYA	3.371	73	Deklarasi ODF
	KEC. BEKASI BARAT	132.415	75	
15	BINTARA	20.083	-	Bebas ODF
16	BINTARA JAYA	10.340	8	Deklarasi ODF
17	KRANJI	14.950	29	Deklarasi ODF
18	KOTA BARU	12.418	-	Bebas ODF
19	JAKA SAMPURNA	74.624	38	Deklarasi ODF
	KEC. BEKASI TIMUR	62.698	496	
20	MARGAHAYU	15.262	54	Deklarasi ODF
21	DUREN JAYA	16.348	-	Bebas ODF
22	AREN JAYA	15.826	-	Bebas ODF
23	BEKASI JAYA	15.262	442	Deklarasi ODF
	KEC. PONDOK GEDE	67.902	297	
24	JATI WARINGIN	15.351	27	Deklarasi ODF
25	JATI MAKMUR	12.197	99	Deklarasi ODF
26	JATI CEMPAKA	14.483	27	Deklarasi ODF
27	JATI BENING BARU	12.623	144	Deklarasi ODF
28	JATI BENING	13.248	-	Bebas ODF

N O	KELURAHAN	JUMLAH KK	JML KK YG MASIH BABS	KET
	KEC. JATI ASIH	89.885	225	
29	JATI ASIH	11.309	-	Bebas ODF
30	JATI RASA	12.151	-	Bebas ODF
31	JATI MEKAR	12.330	36	Deklarasi ODF
32	JATI KRAMAT	13.307	-	Bebas ODF
33	JATI LUHUR	19.788	134	Deklarasi ODF
34	JATI SARI	21.000	55	Deklarasi ODF
	KEC. BEKASI UTARA	87.814	606	
35	PERWIRA	7.531	144	Deklarasi ODF
36	HARAPAN JAYA	21.979	14	Deklarasi ODF
37	TELUK PUCUNG	16.234	231	Deklarasi ODF
38	HARAPAN BARU	7.349	61	Deklarasi ODF
39	KALI ABANG TENGAH	27.620	141	Deklarasi ODF
40	MARGA MULYA	7.101	15	Deklarasi ODF
	KEC. MEDAN SATRIA	64.177	366	
41	MEDAN SATRIA	8.960	107	Deklarasi ODF
42	PEJUANG	37.482	150	Deklarasi ODF
43	KALI BARU	9.891	100	Deklarasi ODF
44	HARAPAN MULYA	7.844	9	Deklarasi ODF
	KEC. RAWA LUMBU	64.729	15	
45	BJ RAWA LUMBU	16.635	-	Bebas ODF
46	PENGASINAN	22.871	-	Bebas ODF
47	BOJONG MENTENG	14.341	15	Deklarasi ODF
48	SEPANJANG JAYA	10.882	-	Bebas ODF
	KEC. BANTAR GEBANG	35.663	15	
49	BANTAR GEBANG	10.719	-	Bebas ODF
50	SUMUR BATU	7.526	15	Deklarasi

N O	KELURAHAN	JUMLAH KK	JML KK YG MASIH BABS	KET
				Bebas ODF
51	CIKETING UDIK	7.720	-	Bebas ODF
52	CIKIWUL	9.698	-	Bebas ODF
	KEC. MUSTIKA JAYA	55.424	622	
53	CIMUNING	11.847	315	Deklarasi ODF
54	MUSTIKA JAYA	16.735	138	Deklarasi ODF
55	MUSTIKA SARI	11.689	19	Deklarasi ODF
56	PEDURENAN	15.153	150	Deklarasi ODF
	JUMLAH	786.939	3.665	16 Kelurahan Bebas ODF

Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen STBM (sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Pilar ke 1 (stop Buang air Besar Sembarangan)/ ODF (Open Defecation Free) Di Kota Bekasi, diperoleh hasil bahwa seluruh kelurahan (56 Kelurahan) di Kota Bekasi Sudah melakukan Deklarasi ODF/Stop Buang air Besar Sembarangan dan baru 16 Kelurahan yang sudah dinyatakan bebas ODF

Pencapaian ODF tersebut dapat tercapai karena beberapa upaya yang dilakukan untuk pemenuhan sarana sanitasi, upaya upaya tersebut antara lain :

1. Pembangunan Jamban/Septic tank
2. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pemabangunan sanitasi, melalui
 - Geser Si Jahat = Gerakan Seribu Rupiah Siapkan Jamban Sehat, membangun 23 jamban di wilayah Kel. Margahayu
 - Si Abang Mandra = Sanitasi dan Air bersih untuk masyarakat Medan Satria, membangun jamban komunal untuk 150 kk di kel. Medan Satria
 - Panutan Ujang = Panitia hari kesehatan untuk jamban, membangun jamban untuk 59 kk tersebar di beberapa kelurahan
 - Bu Odah = BKM untuk ODF atuh Hebat, membangun jamban untuk 73 kk dari Badan Keswadayaan Masyarakat di wilayah Kel. Kota Baru
3. Melaksanakan pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) di wilayah yang masih terdapat pada warga BABS (Buang Air Besar Sembarangan)

4. Melaksanakan verifikasi data warga yang masih belum memiliki jamban

Pada Tahun 2024 PJ Wali Kota Bekasi menetapkan SK Walikota Bekasi tentang Pembentukan Tim Monitoring Sanitasi”MODAL KA SAKOLA” Monitoring Dalam Peningkatan Sanitasi Kota yang Layak dan Aman Para Koordinator yang diketuai oleh para Kepala OPD, Bersama para Camat, Lurah dan Kepala Puskesmas dengan tugas untuk melakukan monitoring progres peningkatan pembangunan sanitasi di 12 wilayah kecamatan.

E. PRESTASI ORGNISASI

Selama kurun waktu tahun 2024 Dinas Kesehatan telah mendapatkan beberapa prestasi yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel. 3.14. Penghargaan Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2024

Tanggal	Dikeluarkan oleh	Penghargaan	Kategori
04-Jan-24	Wali Kota Bekasi	Piagam Penghargaan Dinas Kesehatan	Atas penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 berdasarkan SK ketua ombudsman RI nomor 418 tahun 2023 tentang hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023
08-Aug-24	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia	Piagam Penghargaan	Sebagai pemerintah daerah dengan kategori madya dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC)
16-Aug-24	Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Piajam Penghargaan Mitra Kerja	Dinas Kesehatan Kota Bekasi berperan aktif dalam memberikan pelayanan program pemerintah, yaitu penyakit tuberculosis, HIV-AIDS dan jaminan sosial bagi warga binaan lembaga permasyarakatan kelas IIA Bekasi
07-Oct-24	Pemerintah Kota Bekasi Sekretariat Daerah	Setifikat	Dinas Kesehatan Kota Bekasi sebagai PPID uji petik pada visitasi dan presentasi kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik tingkat provinsi jawa barat tahun 2024
24-Oct-24	Wali Kota Bekasi	Piagam Penghargaan	Penghargaan Inovasi Sirine PSC 119 Dinas Kesehatan sebagai TOP 10 Inovasi Terbaik lomba inovasi daerah kota bekasi tahun 2024

Tanggal	Dikeluarkan oleh	Penghargaan	Kategori
24-Oct-24	Wali Kota Bekasi	Piagam Penghargaan	Penghargaan Juara I kepada RSUD Type D Jatisampurna ketegori RSUD Type D/Puskesmas ter-Inovatif
24-Oct-24	Wali Kota Bekasi	Piagam Penghargaan	Penghargaan Juara II kepada Puskesmas Jatibening ketegori RSUD Type D/Puskesmas ter-Inovatif
24-Oct-24	Wali Kota Bekasi	Piagam Penghargaan	Penghargaan Juara III kepada Puskesmas Karang Kitri ketegori RSUD Type D/Puskesmas ter-Inovatif
24-Oct-24	Wali Kota Bekasi	Piagam Penghargaan	Penghargaan Puskesmas Bintara Jaya ketegori TOP 5 RSUD Type D/Puskesmas ter-Inovatif
24-Oct-24	Wali Kota Bekasi	Piagam Penghargaan	Penghargaan Puskesmas Jatirahayu ketegori TOP 5 RSUD Type D/Puskesmas ter-Inovatif
12-Nov-24	Dirjen Kesmas Kemenkes RI	Sertifikat Penghargaan kepada Dinas Kesehatan kota bekasi	Penghargaan Kota Bekasi sebagai Kabupaten / Kota yang sudah Bebas Buang Air Besar Sembarangan atau Open Defecation Free (ODF)
12-Nov-24	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Piagam penghargaan kepada kota bekasi	Penghargaan Perusahaan yang Berkomitmen pada Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) untuk PT. Arnott's Indonesia binaan UPTD Puskesmas Medan Satria
12-Nov-24	Gubernur Jabar	Piagam penghargaan	Penghargaan Perusahaan / Tempat Kerja yang Berkomitmen pada K3 Perkantoran untuk Kantor Pemda Kota Bekasi binaan UPTD Puskesmas Marga Jaya
12-Nov-24	Gubernur Jabar	Piagam penghargaan	Penghargaan Perusahaan / Tempat Kerja yang Berkomitmen pada K3 Perkantoran untuk Poltekkes Kemenkes Jakarta III binaan UPTD Puskesmas Jatiwarna
12-Nov-24	Gubernur Jabar	Piagam penghargaan	Penghargaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) untuk Pos UKK Dua Putra (Novi Paperco) binaan UPTD Puskesmas Jatimurni
12-Nov-24	Gubernur Jabar	Piagam penghargaan	Penghargaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) untuk Pos UKK UD. Serba Guna binaan UPTD Puskesmas Aren Jaya
12-Nov-24	Gubernur Jabar	Piagam penghargaan	Juara 3 : Bidan H. Nani (Bidan Praktek Mandiri Wilayah Kerja Puskesmas

Tanggal	Dikeluarkan oleh	Penghargaan	Kategori
			Pondokgede Kota Bekasi)
13-Nov-24	Gubernur Jabar	Piagam penghargaan	Penghargaan kota bekasi sebagai terbaik I kabupaten/kota akseleratif dalam percepatan penurunan stunting dibawah 14 persen tahun 2023
11-Nov-24	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Piagam penghargaan	Peringkat 3 kategori kabupaten/kota yang capaian implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Rumah Sakit Terbaik
15-Nov-24	Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	Piagam penghargaan	Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan hasil elektronik monitoring & evaliaso (E-Monev) keterbukaan informasi publik tahun 2024 komisi informasi jawa barat memberikan predikat sebagai badan publik kategori pemerintah kota yang informatif
04-Dec-24	Ombudsman Republik Indonesia	Piagam penghargaan	Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah tahun 2024 Dimensi Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bekasi memperoleh nilai 93,15 dengan kategori Kualitas Tinggi
	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Setifikat Penghargaan	Kota Bekasi sebagai pengendalian TBC dalam kategori pelaksanaan monthly interim cohort analysis (MICA) provinsi jawa barat tahun 2024
	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Setifikat Penghargaan	Kab/kota prioritas PPM dengan pengendalian TBC dan kategori capaian keterlibatan fasyankes swasta provinsi jawa barat tahun 2024

Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian, Tahun 2024

E. KENDALA

Beberapa kendala yang ada dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 adalah:

- a. SDM dengan kualifikasi tenaga kesehatan masih kurang sedangkan jumlah puskesmas mengalami penambahan di tahun 2024, sehingga pemenuhan kebutuhan SDM di Puskesmas masih kurang
- b. Kewajiban pemenuhan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa

- c. Pencapaian target SPM terutama usia produktif belum maksimal karena penentuan sasaran harus seluruh penduduk usia produktif dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksakan kesehatannya.

BAB IV

PENUTUP

Dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam Rencana Strategis (Renstra) yang disusun telah menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ingin dicapai. Ketiga indikator kinerja tersebut adalah nilai AKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan dan Usia Harapan Hidup. Tahun 2024 ketiga indikator tersebut telah mencapai target tahunan yang ditetapkan. Dengan nilai capaian >100%. Selain itu juga terdapat efisiensi dalam pencapaian indikator kinerja dengan nilai >10%.

Meskipun target kinerja tahun 2024 telah tercapai, tetapi ada beberapa evaluasi yang harus ditindaklanjuti agar kinerja tahun 2024 menjadi lebih baik lagi. Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan tahun 2024 adalah

1. Pemenuhan SDM kesehatan dengan menambah jumlah nakes melalui anggaran BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit.
2. Peningkatan kapasitas SDM dengan memberikan beberapa pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya
3. Perencanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih selektif dan memperhatikan nilai TKDN.
4. Penguatan capaian SPM terutama usia produktif dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program serta meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat
5. Meningkatkan pelayanan terutama diluar gedung Puskesmas untuk mendapatkan sasaran penduduk yang tidak melakukan kunjungan ke Puskesmas
6. Meningkatkan promosi kesehatan termasuk komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya upaya penemuan kasus penyakit/penjaringan kesehatan/deteksi dini.
7. Penguatan layanan rujukan terpadu melalui penguatan PSC 119

Demikian LKIP tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Bekasi ini disusun, dengan harapan dapat meningkatkan capaian kinerja menjadi lebih baik lagi.

Bekasi, 25 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Kesehatan



Dr. H. Hartatulah, M.Pd.
Perilaku Muda / IV.c
NIP. 19660402 198803 1 011